

RENCANA STRATEGIS DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
TAHUN 2025-2029

D P R K P
B A N T E N





GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

20. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
21. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
24. Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dari kegiatan, program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi.
27. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pagu indikatif program Renstra Perangkat Daerah dapat berubah berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dan dinamika lingkungan pada saat penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan bagi Perangkat Daerah yang terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;

- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
- g. Dinas Sosial Provinsi Banten;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
- j. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
- m. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
- n. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
- t. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
- u. Dinas Pertanian Provinsi Banten;
- v. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
- w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- x. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
- bb. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
- cc. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
- dd. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten;

- ee. Badan Penghubung Provinsi Banten;
 - ff. Inspektorat Daerah Provinsi Banten; dan
 - gg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Banten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 9),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 September 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



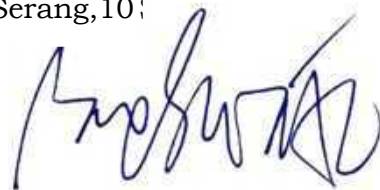
HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 merupakan hasil perwujudan urusan pemerintahan pelayanan dasar wajib dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 Provinsi Banten.

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, maka ditetapkanlah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 untuk menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing bidang/UPT/ sekretariat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten setiap tahun, mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Serang, 10



M. RACHMAT ROGIANTO, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/C)
19710720 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	17
2.1.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	18
2.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	44
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	60
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	61
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan (Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah) ..	61
2.2.1.1 Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah.....	63
2.2.2 Telaahan Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga	70
2.2.2.1 Potensi dan Permasalahan Terkait Urusan	70
2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	74
2.2.3.1 Rencana Pola Ruang Provinsi Banten	74
2.2.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	80
2.2.4 Isu Strategis	82
2.2.4.1 Isu Strategis Perangkat Daerah	83
2.2.4.2 Isu Strategis Provinsi	83
2.2.4.3 Isu Strategis Nasional	85
2.2.4.4 Isu Strategis Internasional	86
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN...87	

3.1	Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	87
3.2	Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	87
3.3	Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	89
3.4	Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	90
3.5	Program Prioritas Renstra Tahun 2025 – 2029.....	92
3.6	Rumusan Program Provinsi Banten berdasarkan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah	93
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	96
4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	96
4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	141
4.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	142
BAB V	PENUTUP	144

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kualifikasi Personil Dinas PRKP Provinsi Banten.....	18
Tabel 2.2.	Data ASN Dinas PRKP Provinsi Banten berdasarkan jenjang keangkatan	18
Tabel 2.3.	Aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	19
Tabel 2.4.	Capaian Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	19
Tabel 2.5.	Capaian Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	20
Tabel 2.6.	Capaian Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	20
Tabel 2.7.	Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Serang	23
Tabel 2.8.	Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang	25
Tabel 2.9.	Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon.....	28
Tabel 2.10.	Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebak.....	29
Tabel 2.11.	Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pandeglang.....	31
Tabel 2.12.	Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tangerang	34
Tabel 2.13.	Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Tangerang	36
Tabel 2.14.	Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Tangerang Selatan	38
Tabel 2.15.	Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.....	41
Tabel 2.16 .	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	48
Tabel 2.17.	Capaian Kinerja SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	60
Tabel 2.18.	Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah	63
Tabel 2.19.	Matrik Tantangan dan Peluang Berupa SWOT	67
Tabel 2.20.	Faktor Penghambat dan Pendorong dari Masing – Masing Misi	67
Tabel 2.21.	Isu KLHS	80

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PRKP Tahun 2025 – 2029	88
Tabel 3.2. Penahapan Renstra Dinas PRKP Tahun 2025 – 2029	90
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	91
Tabel 3.4. Program Prioritas Renstra PD	92
Tabel 3.5. Program Unggulan, Program Turunan dan Prioritas Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	94
Tabel 3.6. Indikasi Kegiatan Prioritas Dinas PRKP Provinsi Banten	94
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	97
Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	120
Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	157
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	162
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	160
Tabel 4.6. Indikasi Kegiatan Prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.Keterkaitan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 1.2.Kedudukan dan Peran RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	3
Gambar 2.1.Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	17

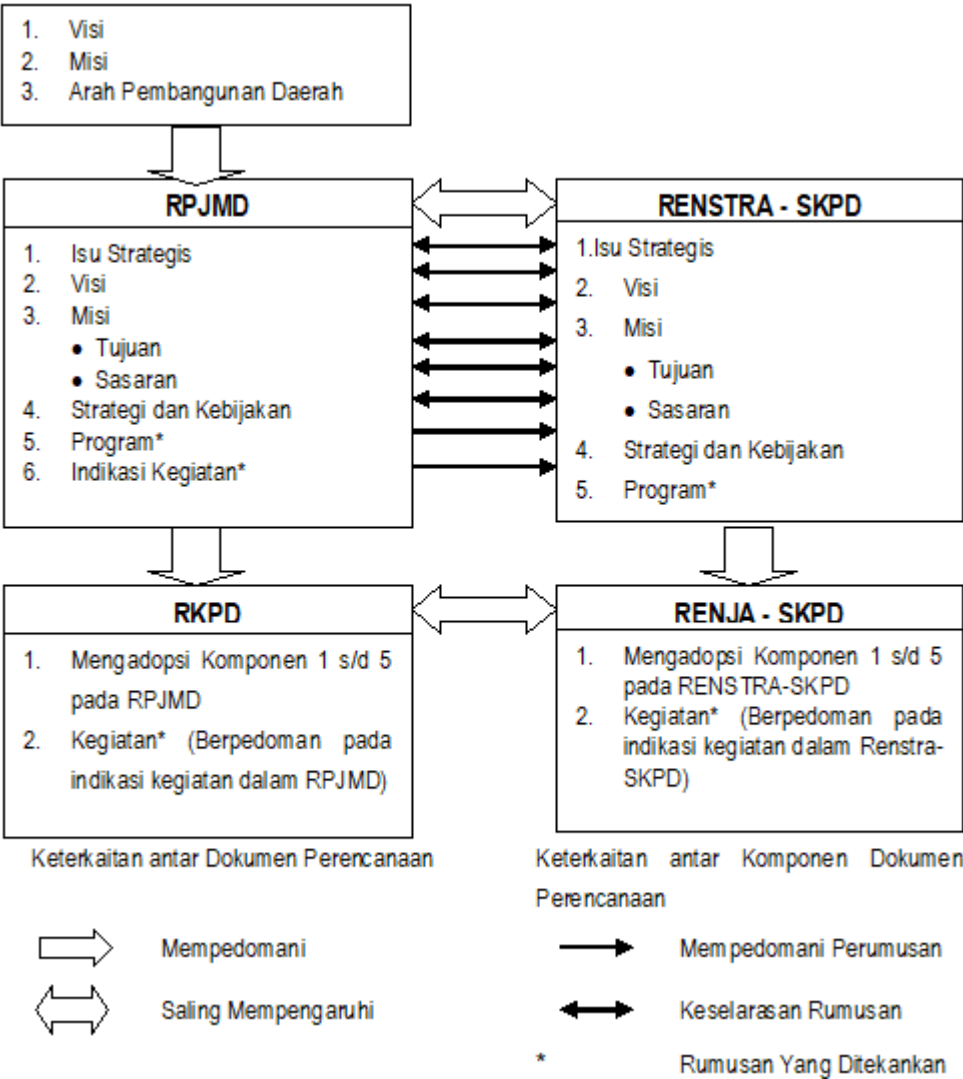
BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

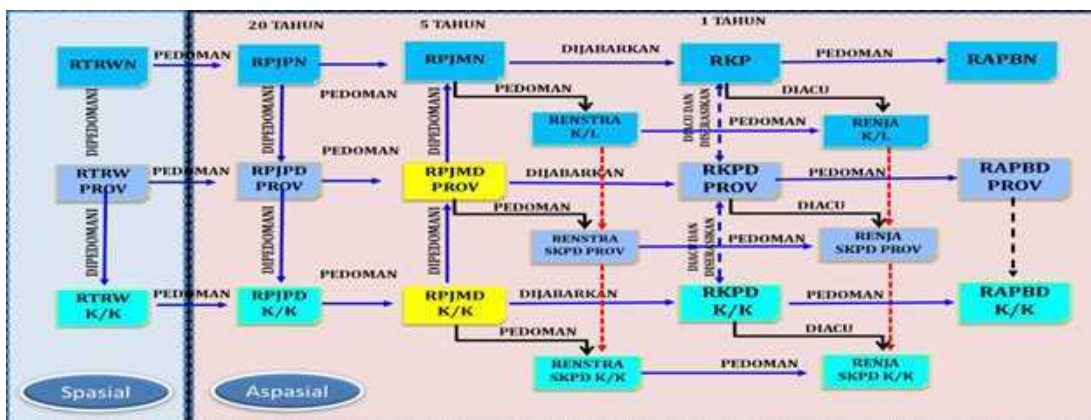
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 Provinsi Banten merupakan panduan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten hingga tahun 2029. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana perangkat daerah yang berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 telah memberikan tata cara penyusunan yang memuat rencana dinas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten merupakan kesatuan dokumen perencanaan pembangunan daerah, oleh karenanya kebijakan dan strategi yang dimuat merupakan upaya – upaya serius untuk menggapai Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2045, adalah “Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa”. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yaitu Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan sebagian Urusan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, dan disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan bersifat indikatif.

Keterkaitan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat. Hubungan tersebut berupa mempedomani dan menjabarkan dokumen yang ada di atasnya, memberi input/bahan bagi dokumen di atasnya sehingga mempengaruhi muatan, dan menyelaraskan muatan dengan dokumen perencanaan yang ada. Bentuk keterkaitan tersebut disajikan pada Gambar 1.1.





Gambar 1.2. Kedudukan dan Peran RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 disusun berlandaskan peraturan perundang–undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683)
 21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan PSU Permukiman di Daerah;
 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

- 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);

35. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 08);
36. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
37. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
38. Peraturan Gubernur Banten Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai pedoman kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan strategis dan teknokratis bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keselarasan perencanaan sektoral dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029.
2. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.
3. Menetapkan arah kebijakan strategis, sistematis, dan berkelanjutan untuk mendukung bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.
4. Menjadi dasar perencanaan tahunan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Mengintegrasikan layanan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

6. Meningkatkan adaptivitas perangkat daerah terhadap dinamika global, nasional, dan regional.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat rangkaian Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun-tahun sebelumnya hingga akhirnya dapat disusun Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat rangkaian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029.

Bab V Penutup

Pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan mandat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah memiliki organisasi dan tugas pokok serta fungsi dalam melaksanakan urusannya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan lingkup tugas pokok yaitu membantu gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan pembantuan termasuk tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Kawasan Permukiman;
- c. Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;
- d. Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pengelolaan izin lokasi;
- f. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- g. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah daerah provinsi;
- i. Fasilitasi redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- j. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- k. Koordinasi pengelolaan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- l. Fasilitasi pengelolaan izin membuka tanah;
- m. Penatagunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- n. Pengurusan hak – hak atas tanah pemerintah;
- o. Survei, pengukuran dan pemetaan;
- p. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanahan;
- q. Koordinasi pengaturan pertanahan di wilayah pesisir, laut, dan pulau;
- r. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
- s. Fasilitasi penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang – undangan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah; dan (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Kepala Bidang Perumahan;
- 4. Kepala Bidang Permukiman;
- 5. Kepala Bidang Pertanahan;
- 6. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Selanjutnya, uraian tugas jabatan mulai dari pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah diatur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta

program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembangunan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang infrastruktur permukiman.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
 - 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Pengembangan Perumahan;
 - b. Kawasan Permukiman;
 - c. Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;
 - d. Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Pengelolaan izin lokasi;
 - f. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
 - g. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - h. Fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah daerah provinsi;
 - i. Fasilitasi redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - j. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - k. Koordinasi pengelolaan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - l. Fasilitasi pengelolaan izin membuka tanah;
 - m. Penatagunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - n. Pengurusan hak – hak atas tanah pemerintah;
 - o. Survei, pengukuran dan pemetaan;

- p. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanahan;
- q. Koordinasi pengaturan pertanahan di wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau;
- r. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
- s. Fasilitasi penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang – undangan.

2. Sekretaris Dinas

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 8) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 10) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 - 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 8) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada dinas;
 - 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dinas;
 - 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada dinas;
 - 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 15) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan program, melaksanakan koordinasi, *monitoring*, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
 - e. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Menengah.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Permukiman

- a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan program,

melaksanakan koordinasi, *monitoring*, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - c. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

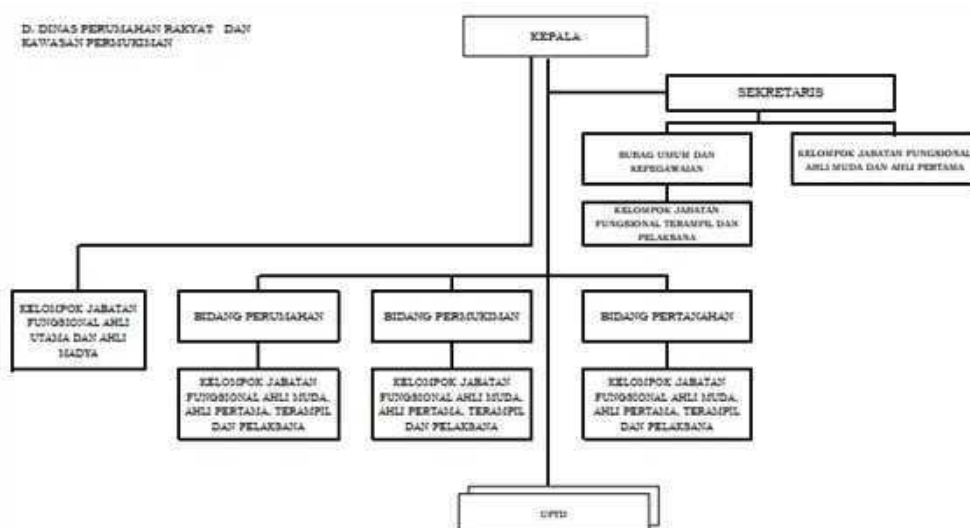
5. Kepala Bidang Pertanahan

- a. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, *monitoring*, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
- 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi;
 - c. Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi;
 - d. Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN);
 - e. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
 - k. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - l. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - m. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
 - n. Rekomendasi Teknis Membuka Tanah;
 - o. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
 - p. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
 - q. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah;
 - r. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin;
 - s. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat;
 - t. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong;
 - u. Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten;
 - v. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan;
 - w. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil;

- x. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH); dan
 - y. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten secara lengkap disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Sumber: Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, Tahun 2022

2.1.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan urusan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Banten. Kualifikasi dan pengalaman untuk mengemban tugas perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi faktor kesuksesan. Selain itu, aset dan fasilitas juga menjadi faktor pendukung dari sumber daya manusia. Berikut ini diuraikan kondisi sumber daya manusia dan aset yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang profesional, berpengetahuan, berakhlak dan memiliki pengalaman secara menerus menjadi penting dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan

permukiman. Demikian halnya dengan kondisi di dinas, saat ini semua tenaga baik pimpinan dan staf telah memenuhi kriteria tersebut.

Berdasarkan laporan kepegawaian sekretariat dinas, terdapat 55 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keseluruhan pegawai tersebut rata-rata berpendidikan Sarjana Strata – 1 dan Pasca Sarjana atau Strata – 2. Secara umum, 89% personil yang ada adalah berpendidikan tinggi. Adapun jumlah pegawai ASN yang ada di dinas disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kualifikasi Personil Dinas PRKP Provinsi Banten

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Org)
1	Sekolah Dasar (SD)	0
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	38
4	Sarjana Muda	5
5	Diploma III	1
6	Diploma IV	0
7	Sarjana Strata – 1	47
8	Sarjana Strata – 2	24
9	Sarjana Strata – 3	1
Jumlah		117

Sumber: Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

Selanjutnya berdasarkan jenjang kepangkatan/golongan, terlihat bahwa terdapat pangkat/golongan IV dengan jumlah sebanyak 10 orang, penata/golongan III sebanyak 44 orang, pengatur/Golongan II berjumlah 1 orang. Informasi berdasarkan jenjang kepangkatan/golongan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Data ASN Dinas PRKP Provinsi Banten berdasarkan jenjang kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Org)
1	Pembina/Golongan IV	11
2	Penata/Golongan III	81
3	Pengatur/Golongan II	2
4	Juru/Golongan I	23
Jumlah		117

Sumber: Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

2.1.3. **Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten**

Inventarisasi Asset

Upaya inventarisasi dan pengamanan aset milik pemerintah daerah provinsi Banten terus dilakukan, khususnya yang terkait dengan aset-aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Aset ini merupakan

asset-aset yang semula berasal dari Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, dipecah menjadi asset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dan asset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Kewenangan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan saat ini sebagian berada di tingkat Nasional dan sebagian telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa bidang pekerjaan umum adalah salah satu urusan pemerintahan yang bersifat concurrent atau dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3. Aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No	Aset	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	22 Unit
2	Kendaraan Roda 2	36 Unit
3	Alat Berat Forklift	1 Unit
4	Alat Berat Baby Roller	1 Unit
5	Alat Berat Beko	1 Unit
6	Komputer dan Printer	191 Unit
7	Laptop	25 Unit
8	Bangunan Gedung	3 Unit

Sumber: Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

Data dan Informasi

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdapat beberapa program kegiatan prioritas pada bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Program kegiatan prioritas tersebut antara lain:

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.

3. Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh.

Tabel 2.4. Capaian Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Tahun	Kab. Pandeglang	Kota Serang	Kab. Serang	Kab. Lebak	Kota Cilegon	Kab. Tangerang	Kota Tangerang	Kota Tangerang Selatan	TOTAL
2022	4	8	6	7		9			34
2023	74	2		64					140
2024	47	14	42	73					176

Sumber: Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025

Tabel 2.5. Capaian Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

Tahun	Kab. Pandeglang	Kota Serang	Kab. Serang	Kab. Lebak	Kota Cilegon	Kab. Tangerang	Kota Tangerang	Kota Tangerang Selatan	TOTAL
2022	4	8	6	7		9			34
2023	74	2		64					140
2024	47	14	42	73					176
TOTAL	125	24	48	144		9			350

Sumber: Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

Tabel 2.6. Capaian Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI	LUASAN (HA)	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Desa Banjarmasin Kec. Carita Kab. Pandeglang	10,37 Ha	MCK, Ruang Baca, Jalan Lingkungan (Beton dan Paving Blok), Saluran Uditch, dan Box Culvert	Tahun 2023
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang	11 Ha	Jalan Lingkungan (Beton dan Paving Blok) dan Saluran Uditch	Tahun 2023
3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang	12,24 Ha	MCK, Jalan Lingkungan, dan PJU	Tahun 2023
4	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang	12,21 Ha	MCK, SAB, Jalan Lingkungan, Pagar, Gapura, Landscape, dan Saluran Pasangan Batu Kali	Tahun 2023
5	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang	12,60 Ha	MCK, Jalan Lingkungan (Paving Blok dan Beton) Jembatan, Balai Warga, SAB, PJU, SALuran Uditch, Box Culvert, dan Taman	Tahun 2023
6	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang	14,50 Ha	Jalan Lingkungan, Saluran Uditch, TPT,	Tahun 2023



NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI	LUASAN (HA)	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
				dan Bak Sampah	
7	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang (Tahap 2)	10,55 Ha		Tahun 2023
8	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang	15 Ha	Gapura, Jalan Lingkungan, Saluran Uditch, SAB, dan PJU	Tahun 2023
9	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Kel. Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	10,86 Ha		Tahun 2023
10	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Kel. Tembong Kec. Cipocokjaya Kota Serang	10,09 Ha	Balai Warga, MCK, SAB, Pagar, Gapura, Jalan Lingkungan, dan Saluran Uditch	Tahun 2023
11	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Banjarmasin Kec. Carita Kab. Pandeglang		RTLH	Tahun 2023
12	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	54 Unit	RTLH	Tahun 2023
13	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Dukuh Kec. Kragilan Kab. Serang	10 Unit	RTLH	Tahun 2023
14	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang	15 Unit	RTLH	Tahun 2023
15	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	35 Unit	RTLH	Tahun 2023
16	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Sukajadi Kec. Carita Kab. Pandeglang	35 Unit	RTLH	Tahun 2023
17	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Sukajadi Kec. Kragilan Kab. Serang		RTLH	Tahun 2023
18	Perbaikan Rumah	Kel. Tembong Kec.		RTLH	Tahun 2023



NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI	LUASAN (HA)	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
	Tidak Layak Huni (RTLH)	Cipocokjaya Kota Serang			
19	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kp. Reforma Desa Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang	30 Unit	RTLH	Tahun 2023
20	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak	0,5 Ha	Jalan Lingkungan Paving Blok dan Drainase Lingkungan	Tahun 2024
21	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak	1,8 Ha	Jalan Lingkungan Paving Blok dan Drainase Lingkungan	Tahun 2024
22	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak	26 Unit	RTLH	Tahun 2024

Sumber: Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

Pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Tabel 2.7. Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Serang

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Jumlah Rumah Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	Unit	147.412	147.807	148.033	148.394	Pendataan DPKP Kota Serang	
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Unit	20.518	20.123	19.897	19.536	Pendataan DPKP Kota Serang	
3	Rumah Susun Hunian Milik								
	Jumlah Rusunami	Total data jumlah Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	-		
	Daya tampung	Total data jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	-		
4	Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa								
	Jumlah Rusunawa	Total Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	-	-	-	3	Pendataan DPKP Kota Serang	
	Daya tampung	Total jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	-	-	-	280	Pendataan DPKP Kota Serang	
5	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Unit	56	-	8	64	Data Serah Terima PSU Perumahan	
6	Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Ha	18,34	-	0,75	19,10	Data Serah Terima PSU Perumahan	
7	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	-	-	-	624	Pendataan DPKP Kota Serang	



NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
8	Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	-	-	-	240,25	Pendataan DPKP Kota Serang	
9	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Unit	-	-	-	46	Dokumen Kajian Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Serang	
10	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Ha	-	-	-	425	Dokumen Kajian Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Serang	
11	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	-	-	-	-		
12	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	-	-	-	-		
13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/kota	Kawasan	-	-	-	75	SK Kumuh Kota Serang Tahun 2024	
14	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/Kota	Ha	-	-	-	162,51	SK Kumuh Kota Serang Tahun 2024	



NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
15	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh per Kab/Kota	Rumah Tangga	-	-	-	5.524	Data Baseline Kumuh Kota Serang Tahun 2024	
16	Jumlah Bangunan Rumah	Berisikan data Jumlah Bangunan Rumah per Kab/Kota	Unit	-	-	-	167.930	Pendataan DPKP Kota Serang	

Sumber : Data Sektoral Tahun 2024

Tabel 2.8. Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Jumlah Rumah Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	Unit	-	-	-	446.432	Laporan penyelenggaraan bantuan sosial penanganan RTLH (BSP-RTLH) TA. 2023	Penanganan RTLH tahun 2024 per 8 agustus 2024 masih belum berjalan, sehingga masih menggunakan data akhir tahun anggaran 2023
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Unit	-	-	-	7.583	Laporan penyelenggaraan bantuan sosial penanganan RTLH (BSP-RTLH) TA. 2023	Penanganan RTLH tahun 2024 per 8 agustus 2024 masih belum berjalan, sehingga masih menggunakan data akhir tahun anggaran 2023
3	Rumah Susun Hunian Milik								



NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Jumlah Rusunami	Total data jumlah Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	-		
	Daya tampung	Total data jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	-		
4	Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa								
	Jumlah Rusunawa	Total Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	-	-	-	-		
	Daya tampung	Total jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	-	-	-	-		
5	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Unit	-	-	-	30	Data PSU yang dikelola Pemerintah (Rekapan Data DPRKP)	
6	Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	M2	-	-	-	11.663	Data PSU yang dikelola Pemerintah (Rekapan Data DPRKP)	
7	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	-	-	-	-		
8	Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	-	-	-	-		
9	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau	Unit	-	-	-	39	Data PSU yang dikelola Pemerintah	



NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
		yang dikelola pemerintah						(Rekapan Data DPRKP)	
10	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	M2	30,827	31,145	31,145	31,43		
11	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	-	-	-	-		
12	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	-	-	-	-		
13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/kota	Kawasan	-	-	-	602	SK Kumuh Kabupaten Serang Tahun 2024	
14	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/Kota	Ha	-	-	-	1.113,92	SK Kumuh Kabupaten Serang Tahun 2024	
15	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/Kota	Rumah Tangga	-	-	-	41.135	SK Kumuh Kabupaten Serang Tahun 2024	
16	Jumlah Bangunan Rumah	Berisikan data Jumlah Bangunan Rumah per Kab/Kota	Unit	-	-	-	454.628	SK Kumuh Kabupaten Serang Tahun 2024	

Sumber : Data Sektoral Tahun 2024

Tabel 2.9. Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Jumlah Rumah Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	Unit	-	-	-	-		
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Unit	-	-	-	2.492		
3	Rumah Susun Hunian Milik								
	Jumlah Rusunami	Total data jumlah Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	-	-	belum ada
	Daya tampung	Total data jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	-	-	belum ada
4	Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa								
	Jumlah Rusunawa	Total Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	-	-	-	-	-	belum ada
	Daya tampung	Total jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	-	-	-	-	-	belum ada
5	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Unit	2	2	2	2	KIB Tanah	
6	Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Ha	-	-	-	-		
7	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	199	199	199	199	inventarisasi 2020	
8	Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	43	43	43	43	inventarisasi 2020	
9	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Unit	33	33	33	33	Inventarisasi RTP	

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
10	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Ha	21,91	21,91	21,91	21,91	Inventarisasi RTP	
11	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	1	1	1	1	Inventarisasi RTP	
12	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	4,5	4,5	4,5	4,5	Inventarisasi RTP	
13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/kota	Kawasan	40	40	40	40	SK Kawasan Kumuh 2024	
14	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/Kota	Ha	76,29	76,29	76,29	76,29	SK Kawasan Kumuh 2025	
15	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh per Kab/Kota	Rumah Tangga	11.502	11.502	11.502	11.502	SK Kawasan Kumuh 2026	Jumlah Jiwa
16	Jumlah Bangunan Rumah	Berisikan data Jumlah Bangunan Rumah per Kab/Kota	Unit	-	-	-	-		

Sumber : Data Sektoral Tahun 2024

Tabel 2.10. Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebak

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Jumlah Rumah Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	Unit	298.958	298.958	298.958	298.958		



NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Unit	42.645	42.645	42.645	42.645		
3	Rumah Susun Hunian Milik								
	Jumlah Rusunami	Total data jumlah Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	-		-
	Daya tampung	Total data jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	-		-
4	Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa								
	Jumlah Rusunawa	Total Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	1	1	1	1		-
	Daya tampung	Total jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	58	58	58	58		-
5	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Unit	-	-	-	-		-
6	Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Ha	-	-	-	-		-
7	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	1671	1671	1671	1671		-
8	Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	20,41	20,41	20,41	20,41		-
9	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Unit	38	38	38	38		-
10	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Ha	9,52	9,52	9,52	9,52		-



NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
11	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	96	96	96	96		-
12	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	122	122	122	122		-
13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh SK KUMUH	Berisikan data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/kota	Kawasan	2083	2083	2083	2083		
14	Luas Kawasan Permukiman Kumuh SK KUMUH	Berisikan data jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/Kota	Ha	2.539,01	2.539,01	2.539,01	2.539,01		
15	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh per Kab/Kota	Rumah Tangga	-	-	-	-		
16	Jumlah Bangunan Rumah	Berisikan data Jumlah Bangunan Rumah per Kab/Kota	Unit	341.603	341.603	341.603	341.603		

Sumber : Data Sektoral Tahun 2024

Tabel 2.11. Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pandeglang

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Jumlah Rumah Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	Unit	243.041	243.041	243.041	243.041	DPKPP	
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Unit	67.908	67.908	67.908	67.908	DPKPP	



NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
3	Rumah Susun Hunian Milik								
	Jumlah Rusunami	Total data jumlah Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	-	-	-
	Daya tampung	Total data jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa								
	Jumlah Rusunawa	Total Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	-	-	-	-		
	Daya tampung	Total jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	-	-	-	-		
5	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Unit	-	-	-	-		
6	Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Ha	-	-	-	-		
7	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	-	-	-	-		
8	Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	-	-	-	-		



NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
9	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Unit	11	11	11	11		
10	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Ha	3,31	3,31	3,31	3,31		
11	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	-	-	-	-		
12	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	-	-	-	-		
13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh SK KUMUH 2019	Berisikan data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/kota	Kawasan	197	197	197	197	DPKPP	-
14	Luas Kawasan Permukiman Kumuh SK KUMUH 2019	Berisikan data jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/Kota	Ha	299,11	299,11	299,11	299,11	DPKPP	-
15	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh per Kab/Kota	Rumah Tangga	66.686	66.686	66.686	66.686	DPKPP	-
16	Jumlah Bangunan Rumah	Berisikan data Jumlah Bangunan Rumah per Kab/Kota	Unit	311.180	311.180	311.180	311.180	DPKPP	-

Sumber : Data Sektoral Tahun 2024

Tabel 2.12. Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tangerang

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Jumlah Rumah Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	Unit	364.249	364.249	364.249	364.249		
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Unit	-	-	-	36.653	Arsip Data Bidang Permukiman	Data awal RTLH Program Gebrak Pak Kumis (PGP) dikurangi Jumlah Penanganan RTLH PGP TW 3 2023
3	Rumah Susun Hunian Milik								
	Jumlah Rusunami	Total data jumlah Rumah Susun Hunian Milik	Unit	32	32	39	39	Arsip Pendataan Bidang Perumahan	2023 belum ada rusunami/Apartemen swasta terbangun baru
	Daya tampung	Total data jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Milik	Unit	3.750	3.750	48.576	48.576	Arsip Pendataan Bidang Perumahan	2023 belum ada rusunami/Apartemen swasta terbangun baru
4	Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa								
	Jumlah Rusunawa	Total Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	0	0	0	0	Arsip Pendataan Bidang Perumahan	Kab Tangerang Belum Memiliki RUSUNAWA milik pemerintah
	Daya tampung	Total jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	0	0	0	0	Arsip Pendataan Bidang Perumahan	Kab Tangerang Belum Memiliki RUSUNAWA milik pemerintah
5	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Unit	107	107	107	107	Arsip Data Bidang Pertanahan dan Pemakaman	Data 2022, Update per akhir tahun
6	Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Ha	249.32	249.33	249.34	249.35	Arsip Data Bidang Pertanahan dan Pemakaman	Data 2022, Update per akhir tahun

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
7	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	1	1	1	1	Arsip Data Bidang Pertanahan dan Pemakaman	Data 2022, Update per akhir tahun
8	Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	40	40	40	40	Arsip Data Bidang Pertanahan dan Pemakaman	Data 2022, Update per akhir tahun
9	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Unit	-	-	-	-		Kewenangan Data ada pada DLHK, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan, Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau
10	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Ha	-	-	-	-		Kewenangan Data ada pada DLHK, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan, Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau
11	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	-	-	-	-		Kewenangan Data ada pada DLHK, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan, Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau
12	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	-	-	-	-		Kewenangan Data ada pada DLHK, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan, Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/kota	Kawasan	4.219	4.219	4.219	4.219	SK Bupati Tangerang No 050/Kep.1807-Huk/2021	belum update bappeda
14	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/Kota	Ha	2.988,92	2.988,92	2.988,92	2.988,92	SK Bupati Tangerang No 050/Kep.1807-Huk/2021	belum update bappeda
15	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh per Kab/Kota	Jiwa	1.915.072	1.915.072	1.915.072	1.915.072	SK Bupati Tangerang No 050/Kep.1807-Huk/2021	Tidak terdapat data Rumah Tangga, tetapi Jumlah Jiwa, belum update bappeda
16	Jumlah Bangunan Rumah	Berisikan data Jumlah Bangunan Rumah per Kab/Kota	Unit	-	-	-	-		Belum terdapat Jumlah Bangunan Rumah Keseluruhan. Hanya terdapat Jumlah Unit bangunan rumah pada Perumahan dan Jumlah bangunan RTLH

Sumber : Data Sektoral Tahun 2024

Tabel 2.13. Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Tangerang

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Jumlah Rumah Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	Unit	346.249	346.249	346.249	346.249	Hasil Analisis Disperkimtan	
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Unit	-	-	-	-		
3	Rumah Susun Hunian Milik								
	Jumlah Rusunami	Total data jumlah Rumah Susun Hunian Milik	Unit	0	0	0	0	DISPERKIMTAN	Kota Tangerang tidak memiliki Rusunami

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Daya tampung	Total data jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Milik	Unit	0	0	0	0	DISPERKIMTAN	
4	Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa								
	Jumlah Rusunawa	Total Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	4	4	4	4		UPT RUSUNAWA - DISPERKIMTAN UPT RUSUNAWA - DISPERKIMTAN
	Daya tampung	Total jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	1001	1001	1001	1001		
5	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Unit	3	3	3	3		UPT RUSUNAWA - DISPERKIMTAN UPT RUSUNAWA - DISPERKIMTAN
6	Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Ha	15,8	15,8	15,8	15,8		
7	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	6	6	6	6		
8	Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	-	-	-	-		
9	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Unit	244	244	244	244		
10	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Ha	53,7	53,7	53,7	53,7		

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
11	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	-	-	-	-		
12	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	-	-	-	-		
13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/kota	Kawasan	32	32	32	32		DISPERKIMTAN DISPERKIMTAN
14	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/Kota	Ha	76,71	76,71	76,71	76,71		
15	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh per Kab/Kota	Rumah Tangga	-	-	-	-		
16	Jumlah Bangunan Rumah	Berisikan data Jumlah Bangunan Rumah per Kab/Kota	Unit	367.731	367.731	367.731	367.731		BAPPEDA

Sumber : Data Sektoral Tahun 2024

Tabel 2.14. Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Tangerang Selatan

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Jumlah Rumah Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	Unit	493.369	493.369	493.369	493.369		
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Unit	1.025	1.025	1.025	1.025	bidang Permukiman	

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
3	Rumah Susun Hunian Milik								
	Jumlah Rusunami	Total data jumlah Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	-		tidak ada rusunami
	Daya tampung	Total data jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	-		
4	Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa								
	Jumlah Rusunawa	Total Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	2	2	2	2	UPT Rusunawa	
	Daya tampung	Total jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	144	144	144	144		
5	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Unit	11	11	11	11	Bid. Pertanahan dan pemakaman	
6	Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Ha	-	-	-	-		
7	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	166	166	166	166		
8	Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	103,94	103,94	103,94	103,94		
9	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Unit	487	487	487	487		Dinas Lingkungan Hidup

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
10	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Ha	22,67	22,67	22,67	22,67		
11	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	-	-	-	-		
12	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	-	-	-	-		
13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/kota	Kawasan	20	20	20	20	Kepwal Kota Tangerang Selatan No 600.2.1/Kep.237-Huk/2024 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
14	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/Kota	Ha	39,04	39,04	39,04	39,04	Kepwal Kota Tangerang Selatan No 600.2.1/Kep.237-Huk/2024 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
15	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh per Kab/Kota	Rumah Tangga	2.473	2.473	2.473	2.473	Kepwal Kota Tangerang Selatan No 600.2.1/Kep.237-Huk/2024 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
16	Jumlah Bangunan Rumah	Berisikan data Jumlah Bangunan Rumah per Kab/Kota	Unit	330.983	33.983	33.983	33.983	Kepwal Kota Tangerang Selatan No 600.2.1/Kep.237-Huk/2024 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	

Sumber : Data Sektoral Tahun 2024

Tabel 2.15. Data Sektoral Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Jumlah Rumah Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	Unit	-	-	-	1.976.443		
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kab/Kota	Total Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Unit	-	-	-	177.842		
3	Rumah Susun Hunian Milik								
	Jumlah Rusunami	Total data jumlah Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	39		
	Daya tampung	Total data jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Milik	Unit	-	-	-	48.576		
4	Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa								
	Jumlah Rusunawa	Total Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	-	-	-	10		
	Daya tampung	Total jumlah daya tampung Rumah Susun Hunian Sewa	Unit	-	-	-	1.483		
5	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum	Unit	-	-	-	217		

NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
		yang dikelola pemerintah							
6	Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah	Ha	-	-	-	-		
7	Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	-	-	-	2.667		
8	Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	-	-	-	-		
9	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Unit	-	-	-	898		
10	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah	Ha	-	-	-	569		
11	Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Unit	-	-	-	97		
12	Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola swasta/masyarakat	Ha	-	-	-	127		
13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/kota	Kawasan	-	-	-	7.268		



NO	KOMPONEN DATA	PENJELASAN	SATUAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV	SUMBER DATA	KETERANGAN
14	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/Kota	Ha	-	-	-	7.296		
15	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh per Kab/Kota	Rumah Tangga	-	-	-	2.042.395		
16	Jumlah Bangunan Rumah	Berisikan data Jumlah Bangunan Rumah per Kab/Kota	Unit	-	-	-	1.974.055		

Sumber : Data Sektoral Tahun 2024

2.1.4. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Tingkat capaian kinerja Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya (Periode Tahun 2023 - 2026) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.16. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatn ya akuntabilita s kinerja penyelengga raan pemerintah an	Program Kawasan Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	391,6 Ha	0 Ha	109.42 Ha	160 Ha	64.89 Ha	0 Ha	109.42 Ha	130.70 Ha		
		Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - di Bawah 15 Ha	Persentase Ketercapaian Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan Penyusunan/Review/L egalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	2 Dokume n	1 Dokume n

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen
		Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	NA	3 Kelompok Masyarakat		3 Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat		-	6 Kelompok Masyarakat	30 Kelompok Masyarakat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Kegiatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan
		Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	150 orang	350 orang

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - di Bawah 15 Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen				10 Dokumen			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai	29 Dokumen	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	19 Laporan			1 Laporan



N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	219 Unit Rumah	120 Unit Rumah	98 Unit Rumah	69 Unit Rumah	205 Unit Rumah	120 Unit Rumah	247 Unit Rumah	26 Unit Rumah	158 Unit Rumah	145 Unit Rumah
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	100,14 Ha	64,89 Ha	44,94 Ha				109.42 Ha	2,3 Ha		

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)Hasampai dengan diBawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	NA			59,05 Ha	95,12 Ha	64,89 Ha			67,43 Ha	71,84 Ha
		Program Pengembangan Perumahan	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	NA	100%	43.50%	62.34%	75%	100%	47.27%	62.34%	75%	100%
			Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi	NA	100%	25 %	50%	81.17%	100%	25 %	50%	81.17%	100%
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Ptogram Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	3 Dokumen		3 Dokume n				3 Dokume n			



N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	3 Dokumen		3 Dokumen				1 Dokumen			
		Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	NA	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen



N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	3 Dokumen	1 Dokume n	3 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	NA	1 Dokume n		1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n		1 Dokume n	2 Dokume n	1 Dokume n
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	NA	1 Dokume n		1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n		1 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	NA	1 Dokume n		1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n		0		
		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	NA	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50 Orang		60 Orang	180 Orang	160 Orang
		Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	1 Dokumen	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang
		Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	NA	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	NA		2 Dokumen				11 Dokumen			

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	30 Unit Rumah		30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	30 Unit Rumah		42 Unit Rumah	49 Unit Rumah	87 Unit Rumah
		Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	34 Unit Rumah	70 Unit Rumah	100 Unit Rumah	70 Unit Rumah	70 Unit Rumah	70 Unit Rumah	120 Unit Rumah	176 Unit Rumah	110 Unit Rumah	300 Unit Rumah
		Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	NA	60 Unit Rumah	60 Unit Rumah	60 Unit Rumah	60 Unit Rumah	60 Unit Rumah	262 Unit Rumah	363 Unit Rumah	318 Unit Rumah	192 Unit Rumah
		Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	NA	10 Unit Rumah				10 Unit Rumah				
		Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)	NA		3 Ha							

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	NA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen		1 Dokume n				1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n
		Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	NA	1 Dokume n		1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n				
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100%	100%	91.75%	99.44%	99.44%	100%	99.44%	99.32%	97.24%	100%
		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Ketercapaian kegiatan Urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52%	99.32%	100%	100%

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
			Penyelenggaraan PSU Permukiman										
		Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	5 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	17 Dokumen	6 Dok	3 Dok	1 Dok
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2409 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	1910 Lokasi	1863 Lokasi	1164 Lokasi	266 Lokasi
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	242 Laporan	282 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	NA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Kegiatan Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perencanaan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Ketercapaian kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	NA		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
		Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yag selesai tepat waktu	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Ketercapaian penetapan lokasi pengadaan tanah	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Sub Kegiatan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen



N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	NA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA
		Program Penatagunaan Tanah	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	NA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan



N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN (2022)	TARGET 2026	TARGET RENSTRA				REALISASI			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	NA	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dok		1 Dok

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2023 – 2026

A. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum khususnya mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki indikator SPM dalam bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/Permen/M/2018 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota.

Jenis pelayanan dasar dari SPM bidang Perumahan Rakyat meliputi:

- (a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
- (b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Table 2.17. Capaian Kinerja SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No	Indikator	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala provinsi (%)	100	62,34	81,17	100	62,34	0	100
2	Presentase Relokasi Rumah terdampak Program Provinsi (%)	0	50	75,00	100	0	0	100

Sumber: Laporan Capaian SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2024 – 2026

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Dalam melaksanakan tugas pokok urusan pemerintahan

di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki sasaran layanan kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan (Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah)

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa sub urusan layanan dasar yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Terdapat beberapa tugas sebagaimana dijelaskan dalam *Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022* yaitu pada Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan.

Berdasarkan dari berbagai evaluasi layanan urusan yang dikerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, terdapat beberapa permasalahan dan akar masalah pada bidang perumahan, kawasan permukiman dan infrastruktur permukiman yang meliputi:

A. Bidang Perumahan

Kurang optimalnya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program Provinsi menjadi salah satu masalah pada bidang perumahan, dengan akar masalah seperti masih rendahnya pemahaman masyarakat bertempat tinggal di daerah rawan bencana dan pemahaman masyarakat terhadap rumah tahan bencana, serta terbatasnya ketersediaan lahan pada zona aman bencana. Permasalahan selanjutnya adalah banyaknya hunian yang berada pada kawasan rawan bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, puting beliung, abrasi/gelombang pantai, longsor dan sebagainya. Begitu pula masih terdapatnya *backlog* (kepemilikan) yang tinggi di wilayah Provinsi Banten saat ini dan proyeksi kebutuhan di masa depan. Hal ini diakibatkan dari kalah cepatnya penyediaan perumahan layak huni terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud adalah pemenuhan akses rumah layak huni sesuai dengan preferensi masyarakat baik itu MBR informal dan MBR Formal. Permasalahan dari tingginya angka *backlog* ini diakibat dari belum terjangkaunya sistem pembiayaan formal oleh masyarakat yang memiliki preferensi hunian layak huni sesuai dengan ekosistem pembiayaan yang ada. Bank – Bank Himbara yang melaksanakan program rumah subsidi melalui FLPP (sekarang BP Tapera) belum terkoneksi dengan preferensi bagi masyarakat terutama informal. Yang dimaksud dengan masyarakat informal adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak tetap namun layak secara finansial (pemilik usaha UMKM, *entrepreneurship*, dll) dan juga ada

masyarakat yang memang bekerja secara tidak tetap dan secara finansial tidak layak.

Kompleksnya rantai pasok penyediaan rumah umum (subsidi dan komersil) belum mampu untuk mengefisienkan harga perolehan rumah dan juga efektivitas layanan. Seperti pembebasan lahan, bahan baku perumahan, teknologi, pajak, perijinan, manajemen, serah terima PSU, dsb. Berbeda dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang tentunya mampu mengakses ekosistem pembiayaan formal yang komersil. Ekosistem pembiayaan formal dan komersil ini dapat dikategorikan pada sektor industri properti yang memiliki peran sebagai mesin pertumbuhan ekonomi perkotaan (Tangerang Raya, dan Perkotaan Serang).

Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas rantai pasok perumahan formal (subsidi dan komersil) perlu mendapat intervensi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pembiayaan perumahan menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat), sementara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam melakukan fasilitasi berupa berbagai kemudahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Bidang Permukiman

Masih terdapatnya kawasan kumuh di wilayah Provinsi Banten. Kurang optimalnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Provinsi Banten juga menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi. Selanjutnya masih terdapat kawasan kumuh yang masih perlu ditangani di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten termasuk yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Adapun kawasan kumuh tersebut memiliki permasalahan pada aspek bangunan, jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air minum, status tanah, ketersediaan fasilitas damkar yang belum memenuhi standar perumahan yang aman dan layak huni. Permasalahan selanjutnya adalah belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman, dimana permasalahan tersebut dikarenakan masih kurangnya kualitas penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman, serta rendahnya kualitas sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta prasarana sarana, dan utilitas umum.

C. Bidang Pertanahan

Permasalahan pada bidang pertanahan terdiri atas :

- Permasalahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi Banten :
 1. Penolakan masyarakat terhadap ganti rugi;
 2. Kekurangan data dan informasi;
 3. Kendala teknis dan administrasi.

- Permasalahan pada koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah lintas daerah Kabupaten/Kota :
 1. Perbedaan peraturan daerah;
 2. Kurangnya data yang terpadu;
 3. Perbedaan kepentingan antar daerah;
 4. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait.

2.2.1.1. Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah kinerja infrastruktur yang belum optimal. Infrastruktur yang dimaksud mencakup keseluruhan unsur layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, asri, sehat dan berkelanjutan. Lebih lengkap terkait permasalahan yang ada, disajikan pada Tabel 2.18.

Table 2.18. Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Masih banyaknya rumah tangga miskin di Provinsi Banten yang belum memiliki rumah layak huni	Belum maksimalnya upaya dalam pengentasan kemiskinan melalui perbaikan rumah layak huni di perkotaan maupun perdesaan sesuai standar
	Masih banyaknya masyarakat di Provinsi Banten yang belum memiliki hunian layak dalam rangka mengatasi ketimpangan kepemilikan rumah atau backlog	• Belum tersedianya rumah bagi ASN, POLRI, TNI, masyarakat miskin, MBR dan pekerja informal yang harus ditangani sesuai standar • Belum tersedianya rumah bagi Generasi muda dengan desain terbuka (open space) di perkotaan maupun perdesaan yang sesuai standar
	Kurang Optimalnya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	• Belum optimalnya penyediaan lahan untuk huntara/huntap bagi masyarakat korban bencana atau relokasi program provinsi • Belum optimalnya penyediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi • Belum terbangunnya Rumah Khusus dan PSU bagi korban bencana sesuai standar • Belum terbangunnya Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana
Masih tinggi nya luasan kawasan kumuh di Provinsi Banten	Belum Optimalnya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten	• Belum optimalnya penyelenggaraan sarana prasarana di perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Banten • Belum terbangunnya atau terehabnya rumah layak huni di

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Kota se Provinsi Banten	permukiman kumuh di Provinsi Banten
	Belum Optimalnya penataan kawasan permukiman kumuh	- Belum optimalnya pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Banten - Belum optimalnya kesadaran publik dalam melaksanakan peran masyarakat terhadap lingkungan - Masih dibutuhkannya penyusunan regulasi yang berkaitan dengan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Belum optimalnya pengelolaan PSU Permukiman	Belum optimalnya kualitas pengelolaan PSU Permukiman dalam rangka peningkatan lingkungan hunian	- Belum terbangunnya lingkungan hunian yang terdiri lebih dari satu satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU - Belum terlaksananya Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	Belum optimalnya persiapan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi yang selesai tepat waktu	Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholders yang membidangi urusan pertanahan terkait usulan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penetapan lokasi
	Belum optimalnya masyarakat Redistribusi Tanah dan Penataan Akses dari BPN	Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholders yang membidangi urusan pertanahan terkait data jumlah KK penerima akses Reforma Agraria dan jumlah bidang tanah yang didistribusi
	Belum optimalnya pemanfaatan perencanaan penggunaan tanah yang dimanfaatkan	Belum terdatanya kepemilikan tanah baik tanah ulayat, tanah pemprov atau tanah bengkok di wilayah provinsi banten

Sumber: Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten merupakan gambaran yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan layanan dasar. Oleh karenanya melalui uraian di bawah ini diharapkan dukungan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat turut serta mewujudkan cita-cita yang ingin diraih yaitu “Banten Maju Adil, Merata, Tidak Korupsi”. SWOT atau teknis analisis yang digunakan pada sebuah organisasi bertujuan untuk menolong penyesuaian antara sumber daya

yang tersedia, kapabilitas yang dimiliki dan kondisi ekosistem diluar lingkungan organisasi.

I. Kekuatan (*Strength*)

Secara umum organisasi/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki kekuatan. Kekuatan ini dapat dilihat dari landasan hukum pelaksanaan urusan berupa dukungan pimpinan kepala daerah melalui berbagai dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPMD, Renstra, RKPD, RENJA. Tidak hanya itu, dukungan *readiness criteria* juga telah ada sehingga pelaksanaan urusan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari ketersediaan SK Kumuh, Peraturan Pelaksanaan terkait Peningkatan Hunian Layak Huni, hingga lahirnya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) yang mencakup dari berbagai unsur perangkat daerah yang ada.

II. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan yang ada saat ini, tentunya bersifat kondisi internal yang terus dibenahi dalam rangka untuk menguatkan peran dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten untuk melaksanakan berbagai layanan dasarnya. Pembangunan sistem informasi yang handal dan berkelanjutan serta mampu dioperasikan oleh daerah menjadi penting. Kelembagaan yang kolaboratif di tingkat Kab/Kota serta kerjasama dengan Balai menjadi penting. Oleh karenanya pemenuhan database (Kumuh, RTLH, PSU, *Backlog* Rumah, dan Rawan Bencana) menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Tingginya tingkat kerusakan rumah dan infrastruktur dasar PKP pada daerah rawan bencana (Pandeglang, Lebak, Tangerang Raya) menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan layanan cepat dan praktis dalam perencanaan dan pembangunan rumah. Oleh karenanya pemenuhan layanan klinik rumah (PKP rawan bencana, tidak layak huni) menjadi sangat penting. Tantangan yang tak kalah penting adalah ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi masyarakat informal (Desil 1-2). Walaupun telah ada berbagai instrumen bantuan rumah swadaya stimulan baik dari Pemerintah Daerah dan Provinsi, juga instrumen program bantuan rumah khusus – pelaksanaan memiliki hambatan regulasi dan birokrasi. Kewenangan yang terkotak – kotak dan rentang koordinasi yang berlapis dan administratif kalah cepat dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Oleh karenanya diperlukan inovasi penyediaan rumah bagi masyarakat tak mampu (miskin) yang turut memperhatikan *livelihood*-nya. Program ini dapat dipadukan dengan program pusat dan daerah – tentunya dukungan dari Gubernur dan Presiden menjadi faktor penting. Akibat dari rantai pasok penyediaan (*supply – demand*) perumahan umum yang kompleks, sehingga penyediaan rumah umum termasuk rumah khusus sangat administratif dan berjenjang serta multi aktor, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus menjadi fasilitator dan aktor dalam pemberian kemudahan baik itu berupa subsidi, bantuan PSU, penyediaan tanah, dan berbagai insentif lain – dalam rangka

percepatan akses layanan perumahan dan mencegah kumuh yang lebih luas – kemiskinan.

III. Peluang (*Opportunity*)

Secara umum peluang atau potensi dalam memberikan layanan dasar wajib PKP seperti Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat besar. Pemerintah Provinsi dapat berfokus pada wilayah antar kabupaten (perbatasan) yang selama ini tidak diperhatikan oleh masing-masing daerah otonom. Meningkatnya urbanisasi dan konurbasi PKP terutama pada wilayah kewenangan provinsi ini seperti di PKP Perbatasan Cilegon – Serang, PKP Perbatasan Tangerang Raya, PKP Perbatasan Pandeglang – Lebak menuntut perhatian lebih. Wilayah kewenangan ini dapat dijadikan sebagai obyek PSU dengan lanskap yang baik.

Demikian halnya juga dengan tumbuhnya PKP Kota Baru Maja, akibat dari dukungan infrastruktur dasar transportasi kereta, jalan dan tol meningkatkan luasan layanan PKP di Kota Baru Maja. Seiring dengan berkembangnya koridor mulai dari Kota Tangerang Selatan (Sudimara, Rawabuntu, Serpong, Cisauk, Parung Panjang, Cilejit, Daru, Tenjo, Tigaraksa, Maja) akan menjadi area perkotaan mandiri (Otonom Baru) di masa depan. Selanjutnya, Kawasan Strategis di Perkotaan Serang dan Panimbang serta Lebak (KEK Tj Lesung, Banten Lama, Baduy, Lebak) akan semakin terbuka akibat peningkatan layanan jalan tol.

Kemudian, tumbuhnya Kawasan Pendidikan Eksklusif bertaraf Nasional/Internasional (Untirta, dsb) serta tumbuhnya kawasan Sport Center – Pusat Riset Olah Raga dan Tanding akan meningkatkan fungsi layanan Perkotaan Serang termasuk KP3B. Di masa depan Perkotaan Serang akan diharapkan menjadi kota yang *seamless* dan lestari serta madani.

IV. Ancaman (*Threats*)

BPS mencatat ada penurunan jumlah rumah tangga yang mengakses kepemilikan rumah. Kawasan PKP rawan bencana Banten (Gempa bumi, Tsunami, Puting Beliung, Banjir lebih dari 2 jam, Epidemi, Abrasi, Tanah Longsor, Gagal Teknologi) di masa sekarang dan masa depan juga akan menjadi perhatian ancaman. Provinsi Banten berada pada daerah rawan bahaya yang tinggi pada beberapa jenis bencana dan daerah. Oleh karenanya memerlukan perhatian dari Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya adalah daya dukung dan daya tampung perkotaan yang telah melebihi ambang batas (Tangerang Raya). Inovasi dan pendekatan pembangunan yang horizontal (tapak) diharapkan mulai diarahkan pada pembangunan vertikal. Bahwa kelestarian sumber daya alam yang tak terbarukan seperti kawasan lindung termasuk ruang terbuka hijau (publik dan privat) menjadi penopang kehidupan perkotaan terutama dalam penyediaan bahan baku kehidupan. Oleh karenanya Keseimbangan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten menjadi sangat penting.

Lebih lengkap, matrik tantangan dan peluang berupa matrik SWOT (*Strength, Weakness, Oppprtunity, and Threats*) disajikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19. Matrik Tantangan dan Peluang Berupa SWOT

	Kelebihan	Kekurangan
	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Internal	- Pimpinan Daerah yang berkomitmen pada urusan pelayanan dasar wajib perumahan rakyat dan kawasan permukiman. - Memiliki Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPMD, Renstra, RKPD, Renja). - Memiliki kelengkapan <i>readiness criteria</i> (SK Kumuh, Pergub RTLH, Pokja PKP). - Memiliki sumber daya manusia yang handal. - Memiliki kapasitas keuangan. - Memiliki aset dan infrastruktur organisasi.	- Pemenuhan data base (PKP Kumuh, RTLH, PSU, <i>Backlog</i> Rumah, PKP Rawan Bencana). - Pemenuhan layanan klinik rumah (PKP rawan bencana, tidak layak huni). - Ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi masyarakat informal (Desil 1-2). - Rantai pasok penyediaan (<i>supply – demand</i>) perumahan umum yang kompleks.
	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Eksternal	- Meningkatnya urbanisasi dan konurbasi PKP terutama pada wilayah kewenangan provinsi - Tumbuhnya kawasan industri di koridor, tengah dan selatan Banten. - Tumbuhnya PKP Kota Baru Maja. - Tumbuhnya wisata Banten (KEK Tj Lesung, Banten Lama, Baduy, Lebak) - Tumbuhnya kawasan Sport Center – Pusat Riset Olah Raga dan Tanding. - Meningkatnya jumlah <i>backlog</i> rumah, RTLH, kebencanaan, kumuh di wilayah kewenangan provinsi. - Sumber Daya Alam (Pertanian, Gas, Peternakan, dll) Provinsi Banten yang besar.	- Kawasan PKP rawan bencana Banten (Gempa bumi, Tsunami, Puting Beliung, Banjir lebih dari 2 jam, Epidemi, Abrasi, Tanah Longsor, Gagal Teknologi). - Daya dukung perkotaan melebihi ambang batas (Tangerang Raya). - Keseimbangan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten

Sumber: Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

Adapun faktor penghambat dan pendorong dari masing-masing misi dibagi menjadi dua bagian, yakni pada sisi sumber daya manusia dan kelembagaan.

Tabel 2.20. Faktor Penghambat dan Pendorong dari Masing-Masing Misi

Unit/ Aspek	Penghambat	Pendorong
Perumahan Rakyat dan	1) Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai	1) Semakin tingginya beban pelayanan publik dalam penanganan kawasan kumuh,

Unit/ Aspek	Penghambat	Pendorong
Kawasan Permukiman	dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang. 2) Dibutuhkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi. 3) Diperlukan koordinasi internal yang kuat: antarfungsi manajemen, antarsub-bidang serta memenuhi prinsip-prinsip good governance. 4) Pengelolaan: Masih sangat birokratik belum inovatif (ala korporasi), masih bersifat manajemen proyek belum manajemen aset, masih terkesan hanya mengelola supply belum mengelola demand. 5) Data aset infrastruktur PKP belum lengkap. 6) Diperlukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi. 7) Diperlukan penyusunan policy brief (kertas kebijakan) yang cepat	perumahan rawan bencana, prasarana, sarana dan utilitas PKP kawasan strategis, dan lainnya. 2) Multi aktor, multi sektor, dan multi tugas fungsi dari berbagai stakeholder terkait penyelenggaraan urusan PKP dan urusan pertanahan. 3) Keterbukaan layanan publik dan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang sangat krusial. 4) Mandat dan usaha pencapaian tujuan reformasi birokrasi sesuai cita-cita pimpinan daerah. 5) Lintas informasi dan dokumentasi dalam lingkungan internal dinas untuk menyelenggarakan urusan PKP dan urusan pertanahan. 6) Tantangan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak berbasis kebutuhan yang sangat tinggi. 7) Jumlah aset yang belum terinventarisi dengan baik. 8) Dukungan peraturan perundangan di daerah yang belum tuntas sebagaimana mandat dari UU di atasnya termasuk mandat UU Cipta Kerja dan turunannya. 9) Keputusan harian dari pimpinan yang sangat tinggi dan memerlukan kajian cepat, tepat, akurat dan berdampak. 10) Diperlukan adanya peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh. 11) Memenuhi backlog perumahan sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru. 12) Melibatkan kesetaraan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik dari segi akses,

Unit/ Aspek	Penghambat	Pendorong
	untuk pimpinan yang sifatnya early warning/pemecahan masalah yang mendesak dan produk-produk yang sifatnya permintaan. 8) Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek pembangunan, belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan pengembangan aset. 9) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ke depan akan semakin penting dalam menentukan keberlangsungan pengelolaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur di daerah. 10) Proporsi penduduk yang bertambah dan menyebabkan kemiskinan yang tinggi. Sehingga, masih banyak terdapat kawasan permukiman yang kumuh. 11) Masih belum terpenuhinya penyediaan rumah yang berkualitas.	kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

Sumber: Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025

2.2.2. Telaahan Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga

2.2.2.1. Potensi dan Permasalahan Terkait Urusan

1. Pertambahan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi

Berdasarkan proyeksi BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 284,829,000 jiwa dengan populasi terbanyak masih tetap berada di Pulau Jawa yang diperkirakan akan mencapai 158,738,000 jiwa, disusul oleh Pulau Sumatera (62,898,600 jiwa), Pulau Sulawesi (21,019,800 jiwa), Pulau Kalimantan (18,082,600 jiwa), Pulau Bali dan Nusa Tenggara (15,932,400 jiwa), Pulau Papua (4,793,900 jiwa), dan Kepulauan Maluku (3,363,700 jiwa).

Penduduk Indonesia diprediksi akan berkembang di wilayah perkotaan, artinya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan akan tumbuh lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Penduduk perkotaan pada tahun 2025 akan mencapai 60% dari seluruh populasi. Hal ini juga sebagai dampak adanya pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang saat ini mencapai 4,1%.

Urbanisasi diklaim dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, hingga pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Namun demikian urbanisasi harus terkelola dengan baik, pertumbuhan urbanisasi yang relatif tinggi harus diiringi dengan kemampuan tata kelola dan infrastruktur yang memadai.

2. Indeks Daya Saing yang Masih Rendah

Indeks Daya Saing Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian indeks daya saing infrastruktur mengalami sedikit penurunan yaitu pada peringkat 50 di tahun 2019 bila dibandingkan pada tahun 2014 -2015 yang berada pada peringkat 34. Di Kawasan ASEAN saja, indeks daya saing infrastruktur masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Perkembangan Peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia terus meningkat sejak tahun 2015 yang berada pada peringkat 114 menjadi peringkat 72 pada tahun 2018 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 pada peringkat 73. Berdasarkan *World Happiness Report* yang diterbitkan oleh UN SDSN (*United Nation Sustainable Development Solutions Network*) pada tahun 2015, Indeks Kebahagiaan Masyarakat Indonesia masuk dalam peringkat 74. Namun pada tahun 2016 peringkat Indonesia menurun menjadi peringkat 79. Hingga pada tahun 2018, peringkat Indonesia semakin menurun pada peringkat 96 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu peringkat 92.

3. Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana

Perubahan iklim yang terus terjadi telah menimbulkan berbagai bencana yang berdampak lebih luas dan trennya terus mengalami peningkatan, seperti banjir, longsor, kekeringan, badai dan kebakaran lahan. Sebagai contoh, banjir di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan tahun 2019 dipicu oleh cuaca ekstrem, yaitu curah hujan yang sangat tinggi (di atas 300 milimeter per hari). Dampak perubahan iklim terhadap kejadian bencana juga ditambah dengan perubahan tutupan lahan di daerah hulu

yang mengakibatkan banjir bandang dan perubahan pola debit aliran sungai.

Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada pada *Ring of Fire* (Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik) yang merupakan area tumbuhnya 75% seluruh gunung api di dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana dari aktivitas geologi yaitu gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 jumlah kejadian bencana sebanyak 7.996 kejadian. yaitu tahun 2015 (1.694 kejadian), 2016 (2.306 kejadian), 2017 (2.862 kejadian), 2018 (1.134 kejadian), terdiri dari bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang/ Abrasi, Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Api.

Laporan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) berdasarkan data dari *Center for Research on The Epidemiology of Disasters* (CRED), *International Disaster Database* (EM-DAT) menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban jiwa akibat bencana alam tertinggi sepanjang tahun 2018. Dari total 10.373 korban jiwa di seluruh dunia, 4.535 orang diantaranya dari Indonesia. Data ini menunjukkan tingginya kerentanan bencana di Indonesia sekaligus masih lemahnya upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Kejadian bencana alam tidak hanya merenggut korban jiwa namun juga menimbulkan kerusakan infrastruktur yang telah terbangun yang berdampak pada terganggunya kehidupan masyarakat baik secara sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Terlebih, bencana yang terjadi di Indonesia tidak hanya bencana alam, namun juga bencana non alam seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi serta bencana sosial seperti kerusuhan, dan lainnya.

4. Visi Indonesia 2045

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi ditandai dengan kondisi sebagai berikut:

1. Konektivitas darat diwujudkan dengan penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau, jalan tol Jawa dan Sumatera, jalan perbatasan, kereta api di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, serta transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat untukantisipasi mega urban dan urbanisasi di Jawa;
2. Biaya logistik tahun 2045 turun menjadi 8% PDB;
3. Stok Infrastruktur meningkat menjadi 70% PDB pada tahun 2045;
4. Akses masyarakat terhadap prasarana dasar dipenuhi untuk kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, dan perlindungan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

5. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's)

Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang selanjutnya dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Terdapat 17 Tujuan Global dan Sasaran Global serta Sasaran Nasional yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan, namun yang terkait langsung dengan pelaksanaan urusan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup:

- Tujuan 1 - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
- Tujuan 2 - Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
- Tujuan 3 - Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- Tujuan 4 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- Tujuan 5 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- Tujuan 6 - Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- Tujuan 7 - Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

- Tujuan 8 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- **Tujuan 9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.**
- Tujuan 10 - Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
- **Tujuan 11 - Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.**
- Tujuan 12 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- Tujuan 13 - Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14 - Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
- Tujuan 15 - Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati.
- **Tujuan 16 - Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.**
- Tujuan 17 - Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pada beberapa tujuan tersebut yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdapat pada tujuan 9, 11, dan 16.

6. Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025 – 2029

Lokasi Prioritas terkait arah pembangunan kewilayahan di Provinsi Banten dengan *highlight* indikasi intervensi pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial terdapat pada Kawasan Perkotaan Cilegon – Serang (PTHC) dan Kawasan Afirmasi Banten Selatan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang.

Highlight indikasi intervensi penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik pedesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi dan pangan pada Kawasan Afirmasi Banten Selatan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang.

2.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten meliputi sistem perkotaan, sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya. Penanganan infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman masuk ke dalam rencana sistem perkotaan dan sistem prasarana lainnya sebagai berikut:

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan di Provinsi Banten didasarkan atas cakupan wilayah pelayanan. Adapun rencana sistem perkotaan meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdiri dari :
 - a. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang, Kawasan Perkotaan Kota Tangerang, dan Kawasan Perkotaan Kota Tangerang Selatan;
 - b. Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan Perkotaan Kabupaten Serang; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Cilegon.
- 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi Kawasan Perkotaan Pandeglang dan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung;
- 3) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) meliputi Kawasan Panimbang, Kawasan Bayah, dan Kawasan Maja; dan
- 4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL). meliputi Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas, dan Kawasan Cikeuruh Wetan.

b. Rencana sistem prasarana lainnya

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan ruang untuk TPAS dan/atau TPST. Adapun TPST di Provinsi Banten dikembangkan menjadi TPST Regional, yang berada di:

- 1) Kabupaten Tangerang untuk melayani WKP I;
- 2) Kabupaten Serang untuk melayani WKP II; dan
- 3) Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk melayani WKP III Selain penyediaan ruang untuk TPAS dan/atau TPST regional juga mendukung percepatan proyek strategis nasional yaitu pembangunan infrastruktur energi asal sampah di seluruh kabupaten/kota.

2.2.3.1. Rencana Pola Ruang Provinsi Banten

- Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana terdiri dari: Rawan banjir;, Rawan tsunami, Rawan gempa bumi, Rawan kebakaran hutan

dan lahan, Rawan angin topan dan puting beliung, Rawan tanah longsor, Rawan kekeringan; dan Rawan gagal teknologi.

a) Kawasan rawan banjir meliputi:

- 1) Kawasan sekitar DAS Cisadane, DAS Pasanggrahan, DAS Cirarab – Kali Sabi, DAS Cimanceuri dan DAS Cidurian di Kabupaten Tangerang;
- 2) Kawasan sekitar DAS Cisadane di Kota Tangerang;
- 3) Kawasan sekitar DAS Ciliman dan DAS Cilemer di Kabupaten Pandeglang;
- 4) Kawasan sekitar DAS Ciujung dan DAS Cibuangeun di Kabupaten Lebak; dan
- 5) Kawasan sekitar DAS Ciujung di Kabupaten Serang.

b) Kawasan rawan tsunami, terdapat di pesisir pantai, yang meliputi:

- 1) Pantai Utara, terletak di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang;
- 2) Pantai Selatan, terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; dan
- 3) Pantai Barat, terletak Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.

c) Kawasan rawan gempa bumi meliputi :

- 1) Kabupaten Pandeglang
- 2) Kabupaten Lebak;
- 3) Kabupaten Serang;
- 4) Kabupaten Tangerang; dan
- 5) Kota Serang.

d) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi:

- 1) Kabupaten Pandeglang;
- 2) Kabupaten Lebak;
- 3) Kabupaten Serang;
- 4) Kabupaten Tangerang;
- 5) Kota Serang; dan
- 6) Kota Cilegon.

e) Kawasan rawan angin topan dan puting beliung meliputi:

- 1) Kabupaten Pandeglang;
- 2) Kabupaten Lebak;
- 3) Kabupaten Serang;
- 4) Kabupaten Tangerang;
- 5) Kota Serang;
- 6) Kota Cilegon;
- 7) Kota Tangerang; dan
- 8) Kota Tangerang Selatan.

f) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi:

- 1) Kabupaten Pandeglang
- 2) Kabupaten Lebak; dan

- 3) Kabupaten Serang
 - g) Kawasan rawan bencana diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten;
 - h) Kawasan rawan bencana gagal teknologi meliputi:
 - 1) Kabupaten Serang;
 - 2) Kabupaten Tangerang;
 - 3) Kota Serang;
 - 4) Kota Cilegon;
 - 5) Kota Tangerang; dan
 - 6) Kota Tangerang Selatan
 - i) Rehabilitasi *Buffer Zone* rawan bencana melalui RTH sebesar 30%; dan
 - j) Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur kebencanaan yang terintegrasi diarahkan tersebar di wilayah rawan bencana di Provinsi Banten.
- Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Banten

Kawasan strategis di wilayah provinsi ditetapkan berdasarkan kepentingan: pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Selain penetapan kawasan strategis Pemerintah Daerah juga melakukan pengembangan kawasan strategis di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengaturan ruang kawasan strategis provinsi diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 - a. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan perbatasan Negara di laut lepas.
 - b. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan di wilayah:
 - 1) Kawasan strategis nasional meliputi:
 - a) Kawasan Selat Sunda;
 - b) Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu.
 - 2) Kawasan Strategis Provinsi meliputi:
 - a) Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;

- b) Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
 - c) Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
 - d) Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;
 - e) Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah
- c. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan meliputi Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan di wilayah Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang
- d. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan pada: Bendungan Karian di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak;
- e. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan di wilayah:
- 1) Kawasan Strategis Nasional yaitu sekitar Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;
 - 2) Kawasan Strategis Provinsi yaitu kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Untuk menunjang serta mengawal prinsip pembangunan berkelanjutan serta meminimalisir dampak lingkungan yang kemungkinan timbul di Provinsi Banten maka ada beberapa faktor pendorong yang dapat diimplementasikan, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Budidaya:
 - a) Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain:
 - 1) pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan industri (40 kawasan)
 - 2) pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan industri dan permukiman.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program relokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya.

- b) Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain:
 - 1) IPAL terpadu pada kawasan industri
 - 2) Penerapan 3R dan TPST regional
 - 3) Meningkatkan RTH minimal 30%
 - 4) Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak
 - 5) Pengendalian limbah B3.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program pengurangan emisi gas rumah kaca.

- c) Dampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain:
 - 1) Pembuatan sumur resapan
 - 2) Pembuatan bio pori
 - 3) Rehabilitasi daerah tangkapan air (*catchment area*)

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program kebijakan insentif hulu-hilir DAS.

- d) Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati pada wilayah kerja pertambangan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain:
 - 1) Pembinaan dan pengendalian menuju pertambangan ramah lingkungan (*green mining*)
 - 2) Reklamasi hutan bekas area pertambangan;
 - 3) Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Khususnya Program Pengembangan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi.

- e) Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain:
 - 1) Pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman dan sarana olahraga.
 - 2) Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis ekonomi.
- f) Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain:
 - 1) IPAL terpadu pada kawasan strategis
 - 2) Penerapan 3R dan TPA kawasan strategis.
 - 3) Pengendalian sumber emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.

- 4) Pengendalian limbah B3.
- g) Dampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain:
 - 1) Pembuatan sumur resapan.
 - 2) Pembuatan bio pori.
 - 3) Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis.
- h) Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain:
 - 1) Pembinaan dan pengendalian pembangunan kawasan pesisir dan pulau- pulau kecil.
 - 2) Membuat *buffer zone* cagar alam Pulau Dua (Kota Serang).
 - 3) Konservasi hutan mangrove di Kabupaten Tangerang.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program restorasi ekosistem pesisir.
- 2) Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Khususnya Program Pengembangan Sistem Perkotaan (Permukiman)
 - a. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain:
 - 1) IPAL terpadu pada kawasan industri.
 - 2) Meningkatkan RTH minimal 30%
 - 3) Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.

Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca.
 - b. Dampak terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain:
 - 1) Pembuatan sumur resapan
 - 2) Pembuatan bio pori
 - 3) Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis.

2.2.3.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 2.21. ISU KLHS

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Masih banyaknya rumah tangga miskin di Provinsi Banten yang belum memiliki rumah layak huni	Kemiskinan Ekstrem	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation and Infrastructure</i>). Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi	Penurunan Kemiskinan	Kemiskinan di Kawasan daerah tertinggal saat ini sangat berdampak pada D3TLH dan efisiensi pemanfaatan SDA, karena salah satunya penyebab kemiskinan dapat disebabkan oleh krisis penyediaan kebutuhan pangan dan air. Selain itu rendahnya dalam pemanfaatan sumber daya alam pada suatu wilayah sehingga kecilnya nilai perekonomian ada sektor potensial sebagaimana dalam upaya meningkatkan pendapatan per kapita dengan adanya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Sementara terkait dengan program pembangunan SDG's yang belum tercapai saat ini meliputi: Persentase penduduk yang 66,36 persen memiliki Jaminan Kesehatan, realisasi pencapaian, Persentase penyandang disabilitas yang miskin, rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas realisasi pencapaian 100 persen, Rata-rata pertumbuhan	Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					ekonomi di daerah tertinggal, 5 persen, dan Rata-rata Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal, 6,78/4,44 persen. Untuk program pembangunan yang perlu dicapai meliputi: Persentase rumah tangga yang berpendapatan rendah mengakses rumah layak huni (kelompok penduduk 40 persen terbawah), Realisasi Pencapaian 60,78 persen, dan Prevalensi <i>Stunting</i> , 24,5 persen	
	Masih banyaknya masyarakat di Provinsi Banten yang belum memiliki hunian layak dalam rangka mengatasi ketimpangan kepemilikan rumah atau backlog		Terdapat 712 juta orang secara global yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem di tahun 2022, bertambah sebanyak 23 juta orang dibandingkan dengan tahun 2019. Proyeksi terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2030, sekitar 619 juta orang masih akan terjebak dalam kemiskinan ekstrem, menjadikan target pengentasan kemiskinan global	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			semakin menantang.			
	Kurang Optimalnya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program provinsi			Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		
	Belum Optimalnya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kota se Provinsi Banten					
	Belum Optimalnya penataan kawasan permukiman kumuh					
	Belum optimalnya persiapan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi yang selesai tepat waktu					
	Belum optimalnya masyarakat Redistribusi Tanah dan Penataan Akses dari BPN					
	Belum optimalnya pemanfaatan perencanaan penggunaan tanah yang dimanfaatkan					

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

2.2.4. Isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup berbagai informasi dari pimpinan daerah, sektor, dan K/L terkait. Isu strategis ini menjadi input bagi Dinas

dalam melaksanakan urusan pelayanan dasar sesuai dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan.

2.2.4.1. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten mencakup beberapa hal:

- 1) Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan.
- 2) Belum Optimalnya kualitas perumahan dan permukiman berserta infrastruktur dasar.
- 3) Belum Optimalnya Pengelolaan Pertanahan.

2.2.4.2. Isu Strategis Provinsi

Isu strategis merupakan suatu kondisi masalah atau tantangan utama terkini yang perlu dikedepankan dan ditanggulangi dalam melakukan suatu perencanaan pembangunan karena dapat berdampak signifikan terhadap kondisi dimasa mendatang. Selain itu juga secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti.

Isu strategis yang diperhatikan dalam pemetaan tema pembangunan prioritas Provinsi Banten dalam RPJMD 2025-2029, sebagai berikut:

- Pemantapan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani
Isu ini menggambarkan tekad untuk membangun masyarakat yang bermoral Pancasila dan demokratis dengan fondasi iman dan takwa. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani menjadi titik tolak utama dalam mewujudkan perubahan yang menyeluruh. Reformasi birokrasi yang bersih dan melayani merupakan suatu pondasi utama untuk dapat terciptanya pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan tentunya transparan. Peran birokrasi khususnya kepada aparatur sebagai pelayan publik inilah yang menjadi motor atau penggerak reformasi birokrasi yang menjadi krusial, untuk dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dalam pemberantasan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan integritas menjadi nilai yang perlu tertanam dalam setiap aparatur. Hal lainnya yang tidak kalah penting, reformasi birokrasi juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.
- Peningkatan produktivitas ekonomi wilayah
Provinsi Banten dengan posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera-Pulau Jawa yang memiliki potensi yang sangat berdaya saing dalam meningkatkan produktivitas ekonomi disektor unggulan seperti manufaktur, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif (sektor kuliner, fashion, dan kriya). Berbagai potensi ini perlu menjadikan

Provinsi Banten sebagai episentrum bagi pertumbuhan ekonomi Nasional.

- Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten menunjukkan kemajuan signifikan pada Tahun 2024, dengan penurunan persentase penduduk miskin dari 6,17 persen pada Maret 2023 menjadi 5,84 persen pada Maret 2024, dan lebih lanjut menjadi 5,7 persen pada September 2024. Hal ini menggambarkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, maupun mengurangi kantong kemiskinan. Namun demikian hal lainnya masih menyisakan tantangan terhadap kesenjangan wilayah yang dapat mengakibatkan meningkatnya ketimpangan sosial serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, di Kota Tangerang Selatan memiliki angka terendah sebesar 2,36 persen terhadap persentase kemiskinan sementara di Kabupaten Pandeglang mencatatkan persentase kemiskinan yang tinggi mencapai 9,18 persen, serta tantangan lainnya dalam pengentasan kemiskinan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah (ketergantungan pada sektor informal, pendidikan dan keterampilan rendah, minimnya akses terhadap modal dan pasar, dan hal lainnya).

- Peningkatan pemerataan kualitas layanan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM di Provinsi Banten menjadi prioritas strategis dalam upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat menciptakan SDM yang tidak hanya berdaya saing dan inovatif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, gender dengan didukung oleh akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang adil dan berkualitas tanpa diskriminasi.

- Penanggulangan pengangguran terintegrasi

Tantangan yang terjadi dalam penyelesaian permasalahan penanggulangan pengangguran secara terintegrasi di Provinsi Banten mencakup belum optimalnya sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan riil pasar kerja, terutama di daerah dengan angka pengangguran tinggi. Kesenjangan antara wilayah memperlihatkan ketimpangan akses terhadap informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, serta peluang berwirausaha.

- Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan

Dengan memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan, transportasi massal, dan infrastruktur penunjang lainnya secara merata, dapat memposisikan Provinsi Banten sebagai simpul antara Pulau Jawa dan Sumatera, salah satunya melalui pengembangan infrastruktur strategis yang mendukung logistic flux di Sumatera dan Jawa, sehingga tema pembangunan Provinsi Banten dalam dokumen perencanaan menengah sebagai Gerbang Integrasi Ekonomi Jawa Sumatera dan Penyangga Ketahanan Rantai Nilai Industri Nasional

dapat terwujud dengan didukung kolaborasi lintas daerah. Integrasi perencanaan dengan provinsi sekitar juga menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, seimbang, dan saling menguntungkan dalam kerangka pembangunan kawasan metropolitan dan nasional. Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan di Provinsi Banten diarahkan pada meningkatkan layanan infrastruktur, meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, meningkatkan konektivitas transportasi, dan meningkatkan ketahanan energi yang berkelanjutan.

- Penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi potensi bencana
Tantangan penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi potensi bencana di Provinsi Banten terletak pada beberapa aspek kritis, seperti pertumbuhan urbanisasi yang pesat mengakibatkan hilangnya lahan hijau dan merusak ekosistem lokal serta diperparah dengan tingginya alih fungsi lahan dan pertambangan ilegal yang meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Selain itu, Banten sebagai daerah rawan bencana (termasuk gempa bumi dan tsunami) akibat kedekatannya dengan zona subduksi, menghadapi tantangan besar dalam memperkuat sistem mitigasi bencana yang terintegrasi. Terbatasnya infrastruktur peringatan dini akibat tingginya biaya investasi pada infrastruktur sistem peringatan dini yang efisien dan mutakhir, masih perlunya peningkatan kesadaran melalui edukasi kebencanaan, pelestarian lingkungan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat masyarakat.

2.2.4.3. Isu Strategis Nasional

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Isu nasional diangkat dari tantangan pembangunan nasional yang menjadi fokus perencanaan pembangunan Indonesia dalam RPJMN 2025-2029 dan menjadi acuan perencanaan di daerah.

Isu strategis nasional yang menjadi tekanan pada pelaksanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan mencakup tiga (3) hal, diantaranya:

- 1) Penurunan Kemiskinan.
- 2) Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia.
- 3) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

2.2.4.4. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional yang mempengaruhi penyelenggaraan urusan layanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Banten mencakup beberapa hal, diantaranya:

- 1) Politik keamanan dan kesejahteraan antar negara dan serikat internasional. Sebagaimana diketahui, saat ini Rusia dan Eropa berada pada konflik sumber daya alam migas di Ukraina. Hal ini berakibat pada terganggunya sistem perdagangan internasional dan naiknya sejumlah bahan baku konsumsi rumah tangga termasuk di Indonesia.
- 2) Akses air minum dan sanitasi yang aman dan memadai di seluruh dunia yang masih mendapat perhatian secara internasional. Laporan dari UNICEF (2017) menunjukkan bahwa satu dari tiga orang tidak memiliki akses ke air minum yang aman, dua dari lima orang tidak memiliki fasilitas dasar cuci tangan dengan sabun dan air, dan lebih dari 673 juta orang melakukan buang air besar sembarangan. Seperempat fasilitas kesehatan tidak memiliki layanan dasar air. Lebih dari 80 persen air limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi.
- 3) George Galster, Kwan Ok Lee. (2021) dalam laporannya tentang **“Krisis Global Penyediaan Rumah Terjangkau”** menyatakan bahwa perumahan yang tersedia tidak terjangkau oleh sebagian penduduk perkotaan. Kejadian tersebut (tidak terjangkau) justru berada pada daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang besar dan pendapatan rumah tangga yang rendah. Tingkat ketidak-terjangkauan tersebut justru meningkat di kawasan perkotaan Asia bukan di negara-negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar terlalu kuat mengatur dan peran negara semakin berkurang. Hal tersebut terjadi diakibatkan dari respons pasokan yang lebih lambat, pendapatan rumah tangga yang lebih rendah yang dihabiskan untuk perumahan, biaya konstruksi yang relatif lebih tinggi, peraturan penggunaan lahan yang kaku, dan sistem perencanaan yang tidak efisien.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029. Selanjutnya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 juga mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Tahun 2025 – 2029 untuk mencapai visi RPJMD yaitu adalah “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh;
2. Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas;
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

Berpedoman pada visi dan misi RPJMD, dan berdasarkan hasil evaluasi Renstra periode Tahun 2023 – 2026 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029, sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2030.

Adapun tujuan pada Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 yang hendak dicapai dan selaras dengan amanat RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2045 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 adalah **“Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah”**.

3.2. Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Sebagaimana telah dijelaskan terkait tujuan tersebut diatas, maka Sasaran yang hendak dicapai guna meraih tiap tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 mengarah kepada sasaran dan tujuan RPJMD Provinsi Banten



Tahun 2025 – 2029 serta Misi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2045. Keterkaitan antara sasaran Renstra PD dengan tujuan PD mencerminkan pelaksanaan urusan, sub urusan, program dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya, lebih ringkas keterkaitan antara sasaran RPJMD Provinsi Banten dengan Renstra Dinas PRKP Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PRKP Tahun 2025 – 2029

ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan	Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Tujuan PD.1 : Terpenuhiya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		Indikator Tujuan PD.1 : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	67,08%	68,98%	70,89%	72,79%	74,69%	75,31%
			Sasaran PD. 1 : Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Indikator Sasaran PD.1 : Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	65,72%	66,02%	66,32%	66,62%	66,92%	67,22%
			Sasaran PD. 2 : Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Indikator Sasaran PD. 2 : Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	2,33%	5,32%	6,73%	8,01%	9,50%	12,24%
			Sasaran PD. 3 : Terpenuhiya penyediaan PSU permukiman	Indikator Sasaran PD. 3 : Persentase penyediaan prasarana sarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%



ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
				dan utilitas umum (PSU) permukiman						
	Meningkatnya Layanan Infrastruktur			Indikator Tujuan PD.2 : Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Sasaran PD. 4 : Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indikator Sasaran PD. 4 : Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

3.3. Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Strategi dan Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 mempedomani pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029.

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya:



Tabel 3.2. Penahapan Renstra Dinas PRKP Tahun 2025 – 2029

SASARAN PD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	PENGUATAN FONDASI KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
a	b	c	d	e	f
Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Penguatan konsep hunian layak, terjangkau, berkelanjutan, dan tahan bencana.	Mengembangkan sistem fasilitas pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Penguatan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya penyediaan rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.	Penguatan inovasi pendanaan/ pembiayaan dalam fasilitasi masyarakat terhadap akses hunian tahan bencana, layak, terjangkau, terintegrasi dan berkelanjutan (<i>self-sufficient neighborhood</i>).	Pemantapan layanan penyediaan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan.
Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Peningkatan kualitas kawasan kumuh yang didukung dengan penataan kawasan permukiman dan pengurangan backlog kepemilikan rumah.	Percepatan penyediaan hunian layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh	Penguatan kolaborasi pentahelix (pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan stakeholder) penanganan kawasan kumuh.	Inovasi penanganan terpadu dalam mendukung pengentasan kawasan permukiman.	Pemantapan pengembangan penataan kawasan permukiman kumuh.
Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Penguatan regulasi penyediaan PSU permukiman.	hunian yang terintegrasi dengan fasilitas publik, pusat aktivitas ekonomi, transportasi (hunian berbasis transit/tod), dan infrastruktur dasar lainnya.	Penguatan kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU permukiman.	Peningkatan inovasi dalam rangka penyediaan PSU permukiman.	Pemantapan layanan smart infrastruktur pada kawasan permukiman.
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Pendataan awal lokasi dan konsultasi publik rencana pembangunan dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Pembentukan dan pelaksanaan fungsi gugus tugas reforma agraria tingkat provinsi.	Peningkatan inovasi dalam penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria dan penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah.	Pemerataan dalam rangka penataan aset Reforma Agraria.

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Arah Kebijakan untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029. Berikut ini adalah Arah Kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah dalam rangka keselarasan dan upaya untuk meraih tujuan pelaksanaan urusan perangkat daerah.

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Banten
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Provinsi
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	SASARAN PD	ARAH KEBIJAKAN PD
a	b	c
Penguatan kebijakan dan skema pembiayaan; peningkatan penyediaan hunian vertikal maupun perumahan layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat guna mengurangi backlog kepemilikan rumah; peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu); penataan kawasan kumuh, dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar dalam mewujudkan ekosistem permukiman yang berkelanjutan dan berketahanan	Sasaran PD. 1 : Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Pembangunan kembali rumah sederhana sehat layak huni bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan
		Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan
		Sosialisasi Pembiayaan perumahan antara lain adalah KPR-FLPP dan pembiayaan mikro perumahan
		Pendataan Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dibangun oleh pemerintah
		Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun dan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi
		Pemetaan lahan potensial yang aman/memiliki tingkat risiko bencana rendah sesuai dengan peta rawan bencana daerah dan sesuai dengan peruntukan lahannya berdasarkan peta pola pemanfaatan ruang
		Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi
		Penyelenggaraan Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	SASARAN PD	ARAH KEBIJAKAN PD
a	b	c
	Sasaran PD. 2 : Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
		Penyadaran publik dalam melaksanakan peran masyarakat terhadap lingkungan
		Penanganan Infarstruktur Dasar Kawasan Permukiman Kumuh
		Penanganan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh
	Sasaran PD. 3 : Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
	Sasaran PD. 4 : Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
		Fasilitasi Penyelenggaraan Reforma Agraria
		Fasilitasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

3.5. Program Prioritas Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam memenuhi tujuan perangkat daerah dalam memenuhi akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah maka ditentukan beberapa program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.4. Program Prioritas Renstra PD

TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PD	KETERANGAN
a	b	c	d	e	f
Tujuan PD.1 : Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			Indikator Tujuan PD.1 : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		

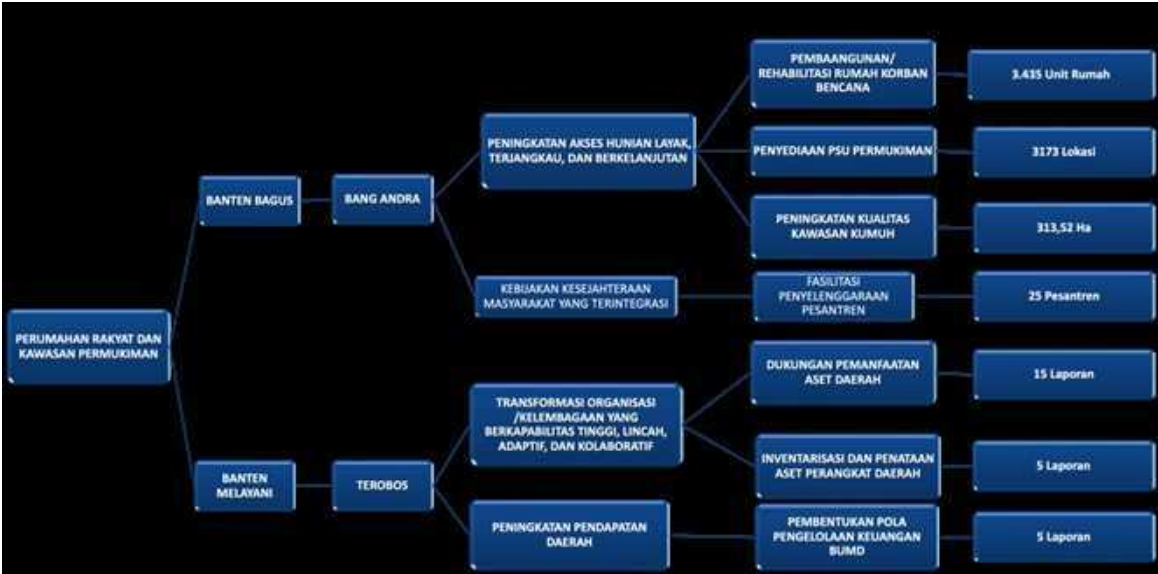


TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PD	KETERANGAN
a	b	c	d	e	f
	Sasaran PD. 1 : Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		Indikator Sasaran PD.1 : Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
	Sasaran PD. 2 : Meningkatnya penataan kawasan permukiman		Indikator Sasaran PD. 2 : Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani		
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	
	Sasaran PD. 3 : Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman		Indikator Sasaran PD. 3 : Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman		
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
	Sasaran PD. 4: Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan		Indikator Sasaran PD. 4: Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan		
		Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

3.6. Rumusan Program Provinsi Banten Berdasarkan Program Unggulan Dan Program Turunan Kepala Daerah

Pencapaian program unggulan dan program turunan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten diintervensi dalam beberapa program prioritas dan prioritas pembangunan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah sebagaimana pada gambar 3.1 dan tabel 3.5.



Gambar 3.2. Diagram Alir Intervensi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

Tabel 3.5. Program Unggulan, Program Turunan dan Prioritas Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

TUJUAN PD	SASARAN PD	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
a	b	c	d	e
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta pemenuhan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Sasaran PD. 1 : Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Banten Bagus	Bang Andra	Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
	Sasaran PD. 2 : Meningkatnya penataan kawasan permukiman			
	Sasaran PD. 3 : Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman			
		Banten Melayani	Terobos	Transformasi Organisasi/ Kelembagaan Yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif, Dan Kolaboratif
				Peningkatan Pendapatan Daerah

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

Tabel 3.6. Indikasi Kegiatan Prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
a	b	c	d	e	f
Banten Bagus	Bang Andra	Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Pembangunan / Rehabilitasi rumah korban bencana	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	3435 Unit Rumah



PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
a	b	c	d	e	f
			Penyediaan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	3173 Lokasi
		Kebijakan kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi	Fasilitasi Penyelenggara n Pesantren	Belanja barang yang diserahkan ke Pondok Pesantren	25 Pesantren
		Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas kawasan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan kumuh	313.52 Ha
Banten Melayani	Terobos	Transformasi Organisasi/Kelemb agaan Yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif, Dan Kolaboratif	Dukungan Pemanfaatan Aset Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15 Laporan
			Inventarisasi Dan Penataan Aset Perangkat Daerah	Menginventaris ir aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5 Laporan
		Peningkatan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Retribusi dan Pemanfaatan Aset sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Retribusi	5 Laporan

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

BAB IV**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah. Selain itu juga program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah provinsi lainnya. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi. Selain itu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten/ kota.

Selanjutnya telah ditetapkan Kawasan Strategis Provinsi, yang menjadi kewenangan pelaksanaan urusan pelayanan dasar Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan mencakup pada:

- 1) Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
- 2) Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
- 3) Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
- 4) Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri; dan
- 5) Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.

Berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2024, digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2025 hingga tahun 2029 mendatang yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Program perangkat daerah yang tercantum dalam sub-bab ini merupakan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Setiap program yang tercantum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada saat dokumen perencanaan ini

dilaksanakan. Program-program tersebut menjelaskan juga pagu indikatif Tahun 2025 – 2029.

Dalam menentukan kerangka pendanaan, dilakukan analisis menggunakan *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. AHP adalah model untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan mendekomposisikannya ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana pada suatu hirarki serta memberikan prioritas alternatif. Salah satu Fungsi AHP adalah untuk menyusun prioritas suatu masalah, strategi, kebijakan, program ataupun kegiatan. Dalam penyusunan AHP tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner pada setiap OPD untuk menilai program yang dianggap menjadi prioritas dalam perencanaan. Berdasarkan AHP dan juga berdasarkan pertimbangan proporsi pendanaan tahun sebelumnya, dilakukan penyusunan ranking setiap program pada masing-masing urusan sehingga ditemukan besaran pendanaan pada setiap program. Berikut ini adalah hasil perhitungan dan arahan kerangka pendanaan pada Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berikut ini adalah hasil perhitungan dan arahan kerangka pendanaan pada Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan pada lima (5) tahun ke depan berdasarkan tantangan, permasalahan, dan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (Persen)		
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
					Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	
				Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan			Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		
			Tersedianya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Pengembangan Perumahan	
				Meningkatnya Pendataan Penyediaan Rumah Korban Bencana Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
					Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Rehabilitasi Rumah Korban Bencana		
					Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
					Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
				Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	
				Terlaksananya Pendistribusia n dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Relokasi Program Provinsi			
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	
					Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
					Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
				Meningkatnya Pendataan Penyediaan Rumah Korban Bencana Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
				Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
			Meningkatnya fasilitas penerbitan sertifikasi dan		Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah		Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU		
				Tercapainya fasilitasi Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				PSU Tingkat Kemampuan Menengah			
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	
		Meningkatnya penataan kawasan permukiman			Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	Kawasan Permukiman	
				Meningkatnya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi		
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	
				Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					(Lima Belas) Ha yang Diremajakan		
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
		Terpenuhi ya penyediaan PSU permukiman			Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman		
			Meningkatnya a penyediaan PSU permukiman		Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
				Tersedianya PSU Permukiman dalam kondisi baik dalam rangka peningkatan ketersediaan rumah layak	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
					Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	
Meningkatnya Layanan Infrastruktur					Indeks Tertib Administrasi Pertanahan		
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan			Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan		
			Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum		Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	
				Terlaksananya Tahapan Persiapan Penetapan	Persentase Tahapan Persiapan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	umum yang selesai tepat waktu		
					Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	
			Meningkatny a akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
				Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				373.461.7 14.637,00		338.369.7 98.000,00		350.183.4 19.000,00		333.723.5 01.000,00		376.931.7 22.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	51,19	70	39.757.62 2.987,00	75	40.508.71 1.000,00	80	41.521.42 9.000,00	85	42.559.46 5.000,00	90	43.623.45 1.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100	80,1	1.750.000. 000,00	83	1.860.000. 000,00	85	1.860.000. 000,00	87	1.860.000. 000,00	90	1.880.000. 000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000, 00	2 Dokumen	30.000.000, 00	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000, 00	3 Dokumen	50.000.000, 00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000, 00	1 Dokumen	15.000.000, 00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000, 00	1 Dokumen	15.000.000, 00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000, 00	1 Dokumen	15.000.000, 00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000, 00	1 Dokumen	15.000.000, 00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000, 00	1 Dokumen	15.000.000, 00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000, 00	1 Dokumen	15.000.000, 00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	17 Laporan	120.000.000,00	17 Laporan	120.000.000,00	17 Laporan	120.000.000,00	17 Laporan	120.000.000,00	17 Laporan	120.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14 Laporan	250.000.000,00	14 Laporan	250.000.000,00	14 Laporan	250.000.000,00	14 Laporan	250.000.000,00	14 Laporan	250.000.000,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	N/A	1 Data	368.915.000,00	1 Data	300.000.000,00	1 Data	300.000.000,00	1 Data	300.000.000,00	1 Data	300.000.000,00
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	N/A	1 Berita Acara	100.000.000,00	1 Berita Acara	100.000.000,00	1 Berita Acara	100.000.000,00	1 Berita Acara	100.000.000,00	1 Berita Acara	100.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Perencanaan Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	N/A	6 Dokumen	821.085.000,00	6 Dokumen	1.000.000.000,00	6 Dokumen	1.000.000.000,00	6 Dokumen	1.000.000.000,00	6 Dokumen	1.000.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)	100	100	25.625.248.987,00	100	26.020.528.000,00	100	26.677.766.000,00	100	27.340.410.000,00	100	28.028.845.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	140 Orang/Bulan	24.285.248.987,00	140 Orang/Bulan	24.649.528.000,00	140 Orang/Bulan	25.265.766.000,00	140 Orang/Bulan	25.897.410.000,00	140 Orang/Bulan	26.544.845.000,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000,00	12 Dokumen	670.000.000,00	12 Dokumen	700.000.000,00	12 Dokumen	720.000.000,00	12 Dokumen	750.000.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	12 Laporan	400.000.000,00	12 Laporan	410.000.000,00	12 Laporan	420.000.000,00	12 Laporan	430.000.000,00	12 Laporan	440.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.00 0,00	1 Laporan	100.000.00 0,00	1 Laporan	100.000.00 0,00	1 Laporan	100.000.00 0,00	1 Laporan	100.000.00 0,00
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000, 00	1 Dokumen	10.000.000, 00	1 Dokumen	10.000.000, 00	1 Dokumen	10.000.000, 00	1 Dokumen	10.000.000, 00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	170.000.00 0,00	18 Laporan	171.000.00 0,00	18 Laporan	172.000.00 0,00	18 Laporan	173.000.00 0,00	18 Laporan	174.000.00 0,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000, 00	1 Dokumen	10.000.000, 00	1 Dokumen	10.000.000, 00	1 Dokumen	10.000.000, 00	1 Dokumen	10.000.000, 00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik	100	100	200.000.0 00,00	100	210.000.0 00,00	100	220.000.0 00,00	100	230.000.0 00,00	100	240.000.0 00,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	3 Laporan	100.000.00 0,00	3 Laporan	110.000.00 0,00	3 Laporan	120.000.00 0,00	3 Laporan	130.000.00 0,00	3 Laporan	140.000.00 0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.00 0,00	1 Laporan	100.000.00 0,00	1 Laporan	100.000.00 0,00	1 Laporan	100.000.00 0,00	1 Laporan	100.000.00 0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	100	100	393.574.0 00,00	100	509.574.0 00,00	100	509.574.0 00,00	100	509.574.0 00,00	100	509.574.0 00,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	2 Paket	143.114.00 0,00	2 Paket	259.114.00 0,00	2 Paket	259.114.00 0,00	2 Paket	259.114.00 0,00	2 Paket	259.114.00 0,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.00 0,00	2 Dokumen	150.000.00 0,00	2 Dokumen	150.000.00 0,00	2 Dokumen	150.000.00 0,00	2 Dokumen	150.000.00 0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	10 Orang	100.460.000,00	10 Orang	100.460.000,00	10 Orang	100.460.000,00	10 Orang	100.460.000,00	10 Orang	100.460.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	100	100	2.215.000.000,00	100	2.450.000.000,00	100	2.720.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.300.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	8 Paket	630.000.000,00	8 Paket	650.000.000,00	8 Paket	700.000.000,00	8 Paket	750.000.000,00	8 Paket	800.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	120.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	125.000.000,00	2 Paket	150.000.000,00	2 Paket	200.000.000,00	2 Paket	250.000.000,00	2 Paket	300.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	1 Laporan	500.000.00 0,00	1 Laporan	600.000.00 0,00	1 Laporan	700.000.00 0,00	1 Laporan	800.000.00 0,00	1 Laporan	900.000.00 0,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.00 0,00	1 Dokumen	150.000.00 0,00	1 Dokumen	150.000.00 0,00	1 Dokumen	150.000.00 0,00	1 Dokumen	150.000.00 0,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6 Dokumen	500.000.00 0,00	6 Dokumen	550.000.00 0,00	6 Dokumen	600.000.00 0,00	6 Dokumen	650.000.00 0,00	6 Dokumen	700.000.00 0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	100	100	2.400.000.000,00	100	1.750.000.000,00	100	1.512.000.000,00	100	1.310.000.000,00	100	1.574.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0 Unit	-	5 Unit	500.000.00 0,00	1 Unit	500.000.00 0,00	1 Unit	500.000.00 0,00	1 Unit	500.000.00 0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	83 Unit	2.400.000.00 00,00	46 Unit	1.250.000.00 00,00	56 Unit	1.012.000.00 00,00	28 Unit	810.000.00 0,00	24 Unit	1.074.000.00 00,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	100	100	1.225.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.350.000.000,00	100	1.450.000.000,00	100	1.550.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	700.000.000,00	12 Laporan	800.000.000,00	12 Laporan	900.000.000,00	12 Laporan	1.000.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	100	100	5.948.800.000,00	100	6.458.609.000,00	100	6.672.089.000,00	100	6.859.481.000,00	100	6.541.032.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Rencana Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70 Unit	62 Unit	1.280.000.000,00	62 Unit	1.280.000.000,00	62 Unit	1.280.000.000,00	62 Unit	1.280.000.000,00	62 Unit	1.280.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	282 Unit	396 Unit	500.000.000,00	396 Unit	500.000.000,00	396 Unit	500.000.000,00	396 Unit	500.000.000,00	396 Unit	500.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rencana Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	2 Unit	3.968.800.000,00	2 Unit	4.478.609.000,00	2 Unit	4.692.089.000,00	2 Unit	4.879.481.000,00	2 Unit	4.561.032.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	100	55.138.000.000,00	100	40.235.000.000,00	100	44.543.000.000,00	100	44.945.000.000,00	100	87.345.000.000,00
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	320.000.000,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.00 0,00	1 Dokumen	120.000.00 0,00	1 Dokumen	120.000.00 0,00	1 Dokumen	120.000.00 0,00	1 Dokumen	120.000.00 0,00
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	600.000.0 00,00	100	600.000.0 00,00	100	900.000.0 00,00	100	1.050.000. 000,00	100	1.150.000. 000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	60 Orang	160 Orang	100.000.000,00	160 Orang	100.000.000,00	160 Orang	200.000.000,00	160 Orang	250.000.000,00	160 Orang	300.000.000,00
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	100 Orang	50 Orang	350.000.000,00	50 Orang	350.000.000,00	50 Orang	450.000.000,00	50 Orang	500.000.000,00	50 Orang	550.000.000,00
Koordinasi untuk Menyepakati Penerimaan dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	54.043.000.000,00	100	39.040.000.000,00	100	43.048.000.000,00	100	43.300.000.000,00	100	85.600.000.000,00
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	42 Unit Rumah	72 Unit Rumah	4.163.000.000,00	86 Unit Rumah	5.040.000.000,00	103 Unit Rumah	6.048.000.000,00	105 Unit Rumah	6.300.000.000,00	110 Unit Rumah	6.600.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	176 Unit Rumah	600 Unit Rumah	40.000.000.000,00	300 Unit Rumah	24.000.000.000,00	400 Unit Rumah	30.000.000.000,00	100 Unit Rumah	30.000.000.000,00	1100 Unit Rumah	72.000.000.000,00
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	363 Unit Rumah	309 Unit Rumah	9.880.000.000,00	200 Unit Rumah	10.000.000.000,00	100 Unit Rumah	7.000.000.000,00	100 Unit Rumah	7.000.000.000,00	100 Unit Rumah	7.000.000.000,00
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0	100	4.270.000. 000,00	100	3.440.000. 000,00	100	3.440.000. 000,00	100	3.440.000. 000,00	100	3.440.000. 000,00
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	440.000.0 00,00	100	440.000.0 00,00	100	440.000.0 00,00	100	440.000.0 00,00	100	440.000.0 00,00
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3 Dokumen	1 Dokumen	120.000.00 0,00	1 Dokumen	120.000.00 0,00	1 Dokumen	120.000.00 0,00	1 Dokumen	120.000.00 0,00	1 Dokumen	120.000.00 0,00
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	0	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00	1 Dokumen	100.000.00 0,00
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.00 0,00	1 Dokumen	120.000.00 0,00	1 Dokumen	120.000.00 0,00	1 Dokumen	120.000.00 0,00	1 Dokumen	120.000.00 0,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	100	3.830.000. 000,00	100	3.000.000. 000,00	100	3.000.000. 000,00	100	3.000.000. 000,00	100	3.000.000. 000,00
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	0	50 Unit Rumah	3.830.000.0 00,00	50 Unit Rumah	3.000.000.0 00,00	50 Unit Rumah	3.000.000.0 00,00	50 Unit Rumah	3.000.000.0 00,00	50 Unit Rumah	3.000.000.0 00,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan	100	100	250.000.0 00,00	100	250.000.0 00,00	100	250.000.0 00,00	100	250.000.0 00,00	100	250.000.0 00,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU											
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase fasilitasi Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	0,65	34,61	118.318.432.795,00	45,68	192.246.250.889,00	54,84	160.577.279.455,00	69,17	155.797.875.774,00	100	126.511.386.701,00
Penataan Kawasan Permukiman	Persentase Penataan Kawasan	100	100	1.076.519.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00
Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	0	6 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	6 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	6 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	6 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	6 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	3 Laporan	226.519.00 0,00	3 Laporan	350.000.00 0,00	3 Laporan	350.000.00 0,00	3 Laporan	350.000.00 0,00	3 Laporan	350.000.00 0,00
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0	150 Orang	200.000.00 0,00	150 Orang	200.000.00 0,00	150 Orang	200.000.00 0,00	150 Orang	200.000.00 0,00	150 Orang	200.000.00 0,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	100	100	117.241.9 13.795,00	100	191.046.2 50.889,00	100	159.377.2 79.455,00	100	154.597.8 75.774,00	100	125.311.3 86.701,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	0	1 Laporan	200.000.00 0,00	1 Laporan	200.000.00 0,00	1 Laporan	300.000.00 0,00	1 Laporan	300.000.00 0,00	1 Laporan	300.000.00 0,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	26 Unit Rumah	521 Unit Rumah	44.710.000.000,00	1158 Unit Rumah	115.800.000.000,00	904 Unit Rumah	90.400.000.000,00	795 Unit Rumah	79.500.000.000,00	236 Unit Rumah	23.600.000.000,00
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	2,30 Ha	76,57 Ha	72.331.913.795,00	36,15 Ha	60.046.250.889,00	32,75 Ha	53.677.279.455,00	38,16 Ha	44.797.875.774,00	70,21 Ha	61.411.386.701,00
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha	0	0	-	150 Unit Rumah	15.000.000.000,00	150 Unit Rumah	15.000.000.000,00	300 Unit Rumah	30.000.000.000,00	400 Unit Rumah	40.000.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	99,32	100	155.727.6 58.855,00	100	61.689.83 6.111,00	100	99.851.71 0.545,00	100	86.731.16 0.226,00	100	115.761.8 84.299,00
Urusan Penyelenggaraa n PSU Permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100	100	155.727.6 58.855,00	100	61.689.83 6.111,00	100	99.851.71 0.545,00	100	86.731.16 0.226,00	100	115.761.8 84.299,00
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	6 Dokumen	1 Dokumen	300.000.00 0,00	1 Dokumen	500.000.00 0,00	1 Dokumen	500.000.00 0,00	1 Dokumen	500.000.00 0,00	1 Dokumen	500.000.00 0,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1872 lokasi	588 Lokasi	154.927.65 8.855,00	216 Lokasi	60.489.836. 111,00	361 Lokasi	98.655.914. 545,00	303 Lokasi	85.581.160. 226,00	380 Lokasi	114.611.88 4.299,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	282 Laporan	1 Laporan	300.000.00 0,00	1 Laporan	500.000.00 0,00	1 Laporan	500.000.00 0,00	1 Laporan	500.000.00 0,00	1 Laporan	500.000.00 0,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Utilitas Umum Permukiman	Utilitas Umum Permukiman											
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	200.000.00 0,00	1 Laporan	200.000.00 0,00	1 Laporan	195.796.00 0,00	1 Laporan	150.000.00 0,00	1 Laporan	150.000.00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				548.888.0 00,00		567.155.0 00,00		599.763.0 00,00		667.698.0 00,00		681.923.0 00,00
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	109.778.0 00,00	100	113.431.0 00,00	100	119.953.0 00,00	100	133.540.0 00,00	100	136.385.0 00,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Persiapan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	100	109.778.000,00	100	113.431.000,00	100	119.953.000,00	100	133.540.000,00	100	136.385.000,00
Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	109.778.000,00	1 Dokumen	113.431.000,00	1 Dokumen	119.953.000,00	1 Dokumen	133.540.000,00	1 Dokumen	136.385.000,00
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	100	439.110.000,00	100	453.724.000,00	100	479.810.000,00	100	534.158.000,00	100	545.538.000,00
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	100	439.110.000,00	100	453.724.000,00	100	479.810.000,00	100	534.158.000,00	100	545.538.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	1 Berita Acara	1 Berita Acara	239.110.00 0,00	1 Berita Acara	253.724.00 0,00	1 Berita Acara	279.810.00 0,00	1 Berita Acara	334.158.00 0,00	1 Berita Acara	345.538.00 0,00
Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	N/A	1 Berita Acara	200.000.00 0,00	1 Berita Acara	200.000.00 0,00	1 Berita Acara	200.000.00 0,00	1 Berita Acara	200.000.00 0,00	1 Berita Acara	200.000.00 0,00
TOTAL PAGU				374.010.6 02.637,00		338.936.9 53.000,00		350.783.1 82.000,00		349.391.1 99.000,00		377.613.6 45.000,00

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Perumahan	Tersedianya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
2	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja yang diharapkan pada periode Tahun 2025 – 2029 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tercapainya seluruh target dalam rangka untuk menjawab permasalahan dan tantangan urusan pelayanan dasar. Target – target tersebut tentunya disesuaikan dengan kapabilitas dan kondisi keuangan daerah.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	67,08	68,98	70,89	72,79	74,69	75,31	
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Nilai	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	65,72	66,02	66,32	66,62	66,92	67,22	
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	Persen	2,33	4,75	6,27	7,53	9,49	13,73	
5	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025



4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	100	100	100	100	Outcome LPPD
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	100	100	100	100	100	100	Outcome LPPD
3	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	Persen	11,03	21,25	34,58	45,62	62,87	100,00	Outcome LPPD
4	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	100	100	100	100	100	100	Outcome LPPD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Outcome LPPD

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Tahun 2025

BAB V**PENUTUP**

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 yang menjadi Pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan oleh seluruh aparat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 5 tahun, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Disadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalamnya, namun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan dalam Infrastruktur terutama bidang Perumahan dan Permukiman dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan latar belakang, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diharapkan agar :

1. Semua Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berkewajiban melaksanakan materi Rencana Strategis ini secara konsisten dan bertanggungjawab dengan memanfaatkan secara tepat dan terarah semua potensi yang dimiliki, berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan.
2. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahun selama lima tahun dan menjadi acuan penyusunan Rencana.
3. Agar visi dan misi yang disepakati dapat terwujud, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten harus lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat terutama bidang perumahan dan permukiman.

Pada akhirnya, melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ini, penyelenggaraan urusan wajib layanan dasar - tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dapat



berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang dicita-citakan bersama.



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang Banten Telepon (0254) 267005,
Laman www.perkim.bantenprov.go.id, Pos-el perkim@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 600/ SK. 249 /Perkim-1/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 – 2026**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tentang Pembentukan Tim Penyusun RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor 000.7.2/1155-Bapp/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal Penyampaian Draft Keputusan Gubernur Banten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menyusun agenda kerja tim penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029;
2. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 dan disinergikan dalam sistem informasi pembangunan daerah;
3. melaksanakan orientasi dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029;
4. melaksanakan penyelarasan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem kesatuan

perencanaan pembangunan nasional dan daerah;

5. melaksanakan Forum Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029;
6. melaksanakan Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029; dan
7. melaporkan hasil penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029 kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, setiap Perangkat Daerah membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Daerah membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 – 2029 di masing – masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 – 2029 di masing – masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, disesuaikan dengan susunan anggota pada Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Serang
Pada tanggal : 27 Maret 2025

KEPALA DINAS



M. RACHMAT ROGIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Nomor : B. 600/ Sk. 299. / p.m.kim / 2025

Tanggal : 27 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENSTRA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 - 2029

NO	JABATAN DALAM TIM		KETERANGAN JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua		Kepala Dinas
2.	Sekretaris		Sekretaris Dinas
3.	Anggota	1.	Kepala Bidang Perumahan
		2.	Kepala Bidang Permukiman
		3.	Kepala Bidang Pertanahan
		4.	Kasubag Umum dan Kepagawaian
		5.	Perencana Ahli Muda
		6.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
		7.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
		8.	Pelaksana pada Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

KEPALA DINAS

M. RACHMAT ROGIANTO



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang Banten Telepon (0254) 267005,
Laman perkim.bantenprov.go.id, Pos-el perkim@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL DESK PENYELARASAN DAN
VERIFIKASI RANKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-
2029 DENGAN RANPERDA RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

Nomor : B. 900.1.2 / 705.2 / pertim / 2025

Pada hari **Selasa** tanggal **05** bulan **Agustus** tahun **2025** telah diselenggarakan desk penyelarasan dan verifikasi Rankhir Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dengan Ranperda RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh para pihak sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- Pemaparan penjelasan teknis pelaksanaan penyelarasan dan verifikasi Rankhir Renstra Perangkat Daerah dengan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 oleh Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Sistem Informasi Pembangunan Bappeda Provinsi Banten.
- Pembahasan, tanggapan dan saran dari seluruh peserta desk penyelarasan dan verifikasi Rankhir Renstra Perangkat Daerah dengan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok desk, maka pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025
Jam : 08.30 s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bidang PSDAIK Bappeda
Provinsi Banten

Desk penyelarasan dan verifikasi Rankhir Renstra Perangkat Daerah dengan Ranperda RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

MENYEPAKATI

- KESATU : Cascading (turunan) tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pada Rankhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dalam Lampiran II.A, II.B, II.C sudah selaras dengan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Program prioritas perangkat daerah pada Rankhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dalam Lampiran III sudah selaras dengan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Program unggulan, program turunan dan prioritas pembangunan Perangkat Daerah pada Rankhir Renstra Perangkat Daerah yang menjadi urusan perangkat daerah sebagaimana dalam Lampiran IV sudah selaras dengan program unggulan, program turunan dan prioritas pembangunan dalam Ranperda RPJMD.
- KEEMPAT : Indikasi kegiatan prioritas perangkat daerah beserta target kinerja dalam pada Rankhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dalam Lampiran V sudah sesuai dengan indikasi kegiatan prioritas dalam Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029.
- KELIMA : Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan Rankhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dalam Lampiran VI telah selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Asta Cita RPJMN 2025-2029.
- KEENAM : Indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Rankhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dalam Lampiran VII.A, VII.B, dan VII.C telah selaras dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- KETUJUH : Berita acara ini beserta Lampiran I sampai dengan Lampiran VII dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi Banten dan sebagai bahan untuk penetapan Peraturan Gubernur tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 05 Agustus 2025

Kepala Dinas,

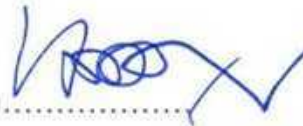
PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kepala Bidang Perumahan	
Kepala Bidang Permukiman	
Kepala Bidang Pertanahan	
Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian	



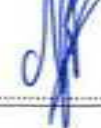
M. Rachmat Rogianto, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710720 200212 1 004

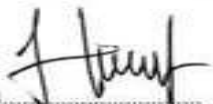
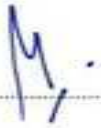
Peserta desk menyetujui Berita Acara Kesepakatan Hasil Desk
Penyelarasan dan Verifikasi Rankhir Renstra Perangkat Daerah dengan
Ranperda RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Serang, 05 Agustus 2025

No.	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1.	Muchamad Rachmat Rogianto, S.T, M.T	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	Kepala Dinas	1)..... 
2.	Dr. Mahdani, SE., ST., M.Si	Bappeda Provinsi Banten	Kepala Bappeda	2).....
3.	Arief Kautsar Setyawan, ST., MT	Bappeda Provinsi Banten	Kepala Bidang Bappeda Mitra PD	3)..... 
4.	Arief Kautsar Setyawan, ST., MT	Bappeda Provinsi Banten	Ketua Tim Sub Koordinator Bappeda / Pendamping Mitra PD	4)..... 
5.	Rinto Yuwono, S.T, M.M	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	Sekretaris	5)..... 
6.	Suhadi, S.T, M.MT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	Kepala Bidang Perumahan	6)..... 
7.	Bagus Hadiyanto, S.T, M.M	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	Kepala Bidang Permukiman	7)..... 
8.	R. Nugraha Dananjaya, S.T	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	Kepala Bidang Pertanahan	8)..... 

DAFTAR HADIR
DESK PENYELARASAN DAN VERIFIKASI RANKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RANPERDA RPJMD PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	ALAMAT DAN NO. TELP	TANDA TANGAN
a	b	c	d	e	
1	Muchamad Rachmat Rogianto, S.T, M.T	Kepala Dinas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		1) 
2	Arief Kautsar Setyawan, ST., MT	Plt. Kepala Bidang PSDAIK	Bappeda Provinsi Banten		2) 
3	Amalia Itani Warganegara, ST., MT	Fungsional Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Banten		3) 
4	Ida Taurusida, SE., M.Si	Fungsional Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Banten		4) 
5	Andi Supyani, ST., M.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Bappeda Provinsi Banten		5) 
6	Rinto Yuwono, S.T, M.M	Sekretaris	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		6) 
7	Suhadi, S.T, M.MT	Kepala Bidang Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		7) 
8	Bagus Hadiyanto, S.T, M.M	Kepala Bidang Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		8) 
9	R. Nugraha Dananjaya, S.T	Kepala Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		9) 

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	ALAMAT DAN NO. TELP	TANDA TANGAN
a	b	c	d	e	f
10	Mezfi Indriani, S.T	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		10) 
11	Agus Supriyadi, S.T, M.A	Fungsional Perencana Ahli Muda	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		11) 
12	Chalil Fauzat, S.T, M.Si	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		12) 
13	Haris Nugraha, S.T, M.M	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		13) 
14	Firman Muntako, S.T	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		14) 
15	Yudi Fribadi, S.T, M.Si	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		15) 
16	Visnu Aria Wardhana, S.T, M.Si, M.T	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		16) 
17	Gunawan, S.T	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		17) 
18	Dr. Taudin Anwar, S.T, M.T	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		18) 
19	Marli Subhiyat, S.Si, M.Si	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		19) 
20	Ratu Husniah, S.T, M.T	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten		20) 

Paraf

Kepala PD	Kepala Bidang Bappeda Mitra PD	Ketua Tim Sub Koordinator Bappeda / Pendamping Mitra PD
		

ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 - 2029

A. ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan	Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Tujuan PD.1: Tersedianya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Tersiptanya Keadilan dalam Pengawasan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		Indikator Tujuan PD.1: Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	67,08%	68,98%	70,86%	72,79%	74,69%	75,51%
			Sasaran PD.1: Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Indikator Sasaran PD.1.1: Persentase Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,72%	66,62%	66,32%	66,62%	66,92%	67,22%
			Sasaran PD.2: Meningkatnya pemerataan kawasan permukiman	Indikator Sasaran PD.2: Persentase Luas Kawasan Rumah Kesenangan Provinsi yang Ditanami	2,33%	5,32%	6,73%	8,61%	9,30%	12,24%
			Sasaran PD.3: Tersedianya penyediaan PSU permukiman	Indikator Sasaran PD.3: Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Layanan Infrastruktur			Indikator Tujuan PD.2: Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Sasaran PD.4: Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indikator Sasaran PD.4: Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

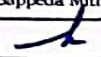
Paraf

Kepala PD	Kepala Bidang Bappeda Mikro PD	Ketua Tim Baku Koordinator Bappeda / Berdaerah, Mikro PD
		

B. STRATEGI/PENAHAPAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

SASARAN PD	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN	PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
a	b	c	d	e	f
Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Penguatan konsep hunian layak, terjangkau, berkelanjutan, dan tahan bencana.	Mengembangkan sistem fasilitas pemblayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Penguatan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya penyediaan rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.	Penguatan inovasi pendanaan/pembiayaan dalam fasilitasi masyarakat terhadap akses hunian tahan bencana, layak, terjangkau, terintegrasi dan berkelanjutan (<i>self-sufficient neighborhood</i>).	Pemantapan layanan penyediaan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan.
Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Peningkatan kualitas kawasan kumuh yang didukung dengan penataan kawasan permukiman dan pengurangan backlog kepemilikan rumah.	Percepatan penyediaan hunian layak huni bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh	Penguatan kolaborasi pentahelix (pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan stakeholder) penanganan kawasan kumuh.	Inovasi penanganan terpadu dalam mendukung pengentasan kawasan permukiman.	Pemantapan pengembangan penataan kawasan permukiman kumuh.
Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Penguatan regulasi penyediaan PSU permukiman.	hunian yang terintegrasi dengan fasilitas publik, pusat aktivitas ekonomi, transportasi (hunian berbasis transit/tod), dan infrastruktur dasar lainnya.	Penguatan kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU permukiman.	Peningkatan inovasi dalam rangka penyediaan PSU permukiman.	Pemantapan layanan smart infrastruktur pada kawasan permukiman.
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Pendataan awal lokasi dan konsultasi publik rencana pembangunan dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Pembentukan dan pelaksanaan fungsi gugus tugas reforma agraria tingkat provinsi.	Peningkatan inovasi dalam penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria dan penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah.	Pemerataan dalam rangka penataan aset Reforma Agraria.

Paraf

Kepala PD	Kepala Bidang Bappeda Mitra PD	Ketua Tim Sub Koordinator Bappeda / Pendamping Mitra PD
		

C. ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

SASARAN PD	ARAH KEBIJAKAN
a	b
Sasaran PD. 1 : Meningkatkan Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Pembangunan kembali rumah sederhana sehat layak huni bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan
	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan
	Sosialisasi Pembiayaan perumahan antara lain adalah KPR-FLPP dan pembiayaan mikro perumahan
	Pendataan Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dibangun oleh pemerintah
	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun dan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi
	Pemetaan lahan potensial yang aman/memiliki tingkat risiko bencana rendah sesuai dengan peta rawan bencana daerah dan sesuai dengan peruntukan lahannya berdasarkan peta pola pemanfaatan ruang
	Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi
	Penyelenggaraan Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan
	Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Sasaran PD. 2 : Meningkatkan penataan kawasan permukiman	Penyadaran publik dalam melaksanakan peran masyarakat terhadap lingkungan
	Penanganan Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman Kumuh
	Penanganan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh
Sasaran PD. 3 : Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Sasaran PD. 4 : Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
	Fasilitasi Penyelenggaraan Reforma Agraria
	Fasilitasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi

Paraf

Kepala PD	Kepala Bidang Bappeda Mitra PD	Ketua Tim Sub Koordinator Bappeda / Pendamping Mitra PD
		

PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PD	KETERANGAN
a	b	c	d	e	f
Tujuan PD.1 : Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			Indikator Tujuan PD.1 : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		
	Sasaran PD. 1 : Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		Indikator Sasaran PD.1 : Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
	Sasaran PD. 2 : Meningkatnya penataan kawasan permukiman		Indikator Sasaran PD. 2 : Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani		
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	
	Sasaran PD. 3 : Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman		Indikator Sasaran PD. 3 : Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman		
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	

Paraf

Kepala PD	Kepala Bidang Bappeda Mitra PD	Ketua Tim Sub Koordinator Bappeda / Pendamping Mitra PD
		

LAMPIRAN IV

: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL DESK PENYELARASAN DAN
VERIFIKASI RANKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
DENGAN RANPERDA RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

NOMOR :

TANGGAL :

**PROGRAM UNGGULAN, PROGRAM TURUNAN
DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH**

TUJUAN PD	SASARAN PD	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
a	b	c	d	e
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta pemenuhan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Sasaran PD. 1 : Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Banten Bagus	Bang Andra	Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
	Sasaran PD. 2 : Meningkatnya penataan kawasan permukiman			
	Sasaran PD. 3 : Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman			
		Banten Melayani	Terobos	Transformasi Organisasi/Kelompok Yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif, Dan Kolaboratif
				Peningkatan Pendapatan Daerah

Paraf

Kepala PD	Kepala Bidang Bappeda Mitra PD	Ketua Tim Sub Koordinator Bappeda / Pendamping Mitra PD
		

DISKUSI KEBUTUHAN PENCETAKAN PERANGKAT DARI
DASAR PENGERTIAN KERTAS DAN KUALITAS PENCETAKAN
PENCETAKAN BANTEN TAHUN 2022-2023

[illegible]

3

Period	Capella PD	Capella Isotonic Dyspareunia PD	Active Time/Total Exercise/Day/Week / Endurance/Active PD
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

PROGRAM/KEGATAN/RUB KEGIATAN BESERTA TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

KIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAMBAH 2024	TARGET DAN PAGO INDIKATOR TARGET											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGO	TARGET	PAGO	TARGET	PAGO	TARGET	PAGO	TARGET	PAGO	TARGET	PAGO
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
URUSAN PEMERINTAHAN RAJA YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUBAHAN DASAR KAWASAN														
PROGRAM PESTUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR PROVINSI														
Pemantauan, Pengawasan, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Realisasi Pelaksanaan pada Perangkat Daerah	51,19	65	26.632.403.000,00	70	26.737.622.987,00	75	40.308.711.000,00	80	41.321.425.000,00	85	42.334.465.000,00	90	42.633.451.000,00
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas Kerja Perangkat Daerah	100	75,2	2.797.000.000,00	80,1	1.790.000.000,00	83	1.840.000.000,00	85	1.850.000.000,00	87	1.860.000.000,00	90	1.880.000.000,00
Pengawasan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perubahan DPA SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	25 Laporan	50.000.000,00	17 Laporan	130.000.000,00	17 Laporan	130.000.000,00	17 Laporan	130.000.000,00	17 Laporan	130.000.000,00	17 Laporan	130.000.000,00
Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	14 Laporan	270.000.000,00	14 Laporan	280.000.000,00	14 Laporan	280.000.000,00	14 Laporan	280.000.000,00	14 Laporan	280.000.000,00
Realisasi Pengumpulan Data Statistik Realisasi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Realisasi Daerah	3/3	3 Data	800.000.000,00	1 Data	368.415.000,00	1 Data	360.000.000,00	1 Data	360.000.000,00	1 Data	360.000.000,00	1 Data	360.000.000,00
Realisasi Sistem Pengumpulan Data Statistik Realisasi Daerah	Jumlah Sistem Pengumpulan Data Statistik Realisasi Daerah	3/3	1 Sistem	137.000.000,00	1 Sistem	130.000.000,00	1 Sistem	130.000.000,00	1 Sistem	130.000.000,00	1 Sistem	130.000.000,00	1 Sistem	130.000.000,00
Pengawasan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	3/3	7 Dokumen	1.110.000.000,00	6 Dokumen	821.000.000,00	6 Dokumen	1.000.000.000,00	6 Dokumen	1.000.000.000,00	6 Dokumen	1.000.000.000,00	6 Dokumen	1.000.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang diinput sesuai SAP (standar akuntansi pemerintahan)	100	100	17.855.652.000,00	100	25.625.348.987,00	100	26.030.328.000,00	100	26.677.796.000,00	100	27.340.430.000,00	100	28.026.945.000,00
Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	58 Orang/Bulan	16.101.940.000,00	140 Orang/Bulan	24.285.248.987,00	140 Orang/Bulan	24.649.528.000,00	140 Orang/Bulan	25.262.796.000,00	140 Orang/Bulan	25.897.432.000,00	140 Orang/Bulan	26.544.845.000,00
Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	8 Dokumen	1.000.000.000,00	12 Dokumen	630.000.000,00	12 Dokumen	670.000.000,00	12 Dokumen	700.000.000,00	12 Dokumen	730.000.000,00	12 Dokumen	750.000.000,00
Realisasi Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	8 Laporan	384.690.000,00	12 Laporan	400.000.000,00	12 Laporan	410.000.000,00	12 Laporan	420.000.000,00	12 Laporan	430.000.000,00	12 Laporan	440.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Tahunan SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.430.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00
Pengelolaan dan Realisasi Sistem Pengumpulan Data Statistik Realisasi Daerah	Jumlah Dokumen Sistem Pengumpulan Data Statistik Realisasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Daerah / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Daerah / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Daerah / Triwulanan / Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	304.532.000,00	18 Laporan	170.000.000,00	18 Laporan	171.000.000,00	18 Laporan	172.000.000,00	18 Laporan	173.000.000,00	18 Laporan	174.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program/Kegiatan Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program/Kegiatan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perawatan Barang Milik Daerah yang terdapat penunjang	100	100	225.332.500,00	100	200.000.000,00	100	210.000.000,00	100	220.000.000,00	100	230.000.000,00	100	240.000.000,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	3 Laporan	120.000.000,00	3 Laporan	100.000.000,00	3 Laporan	110.000.000,00	3 Laporan	120.000.000,00	3 Laporan	130.000.000,00	3 Laporan	140.000.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	105.332.500,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perawatan ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAK	100	100	344.705.500,00	100	393.574.000,00	100	509.574.000,00	100	509.574.000,00	100	509.574.000,00	100	509.574.000,00
Pengadaan Paket Dinas Resmi Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Paket Dinas Resmi Daerah Kabupaten	4 Paket	1 Paket	27.425.500,00	2 Paket	143.114.000,00	2 Paket	229.114.000,00	2 Paket	229.114.000,00	2 Paket	229.114.000,00	2 Paket	229.114.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2 Dokumen	124.707.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	42.373.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berkebutuhan Khusus dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berkebutuhan Khusus dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	10 Orang	100.000.000,00	10 Orang	100.460.000,00	10 Orang	100.460.000,00	10 Orang	100.460.000,00	10 Orang	100.460.000,00	10 Orang	100.460.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perawatan kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	100	100	3.195.383.000,00	100	2.215.000.000,00	100	2.450.000.000,00	100	2.720.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.300.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemangkon Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Pemangkon Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	8 Paket	621.257.280,00	8 Paket	620.000.000,00	8 Paket	650.000.000,00	8 Paket	700.000.000,00	8 Paket	730.000.000,00	8 Paket	800.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	1 Paket	80.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	120.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	126.669.285,00	2 Paket	125.000.000,00	2 Paket	150.000.000,00	2 Paket	200.000.000,00	2 Paket	250.000.000,00	2 Paket	300.000.000,00
Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perantara Pengolahan/Industri	Jumlah Paket Bahan Baku dan Peralatan Perantara Pengolahan/Industri yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00
Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	600.800.000,00	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	600.000.000,00	1 Laporan	700.000.000,00	1 Laporan	800.000.000,00	1 Laporan	900.000.000,00
Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	280.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6 Dokumen	1.171.656.429,00	6 Dokumen	300.000.000,00	6 Dokumen	550.000.000,00	6 Dokumen	600.000.000,00	6 Dokumen	650.000.000,00	6 Dokumen	700.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Perawatan barang milik daerah pemangku urusan pemerintahan sesuai daftar kebutuhan	100	100	3.495.129.000,00	100	2.400.000.000,00	100	1.750.000.000,00	100	1.512.000.000,00	100	1.310.000.000,00	100	1.574.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	4 Unit	255.000.000,00	0 Unit	-	5 Unit	300.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	500.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	2 Unit	3.240.129.000,00	83 Unit	2.400.000.000,00	46 Unit	1.250.000.000,00	26 Unit	1.602.000.000,00	28 Unit	830.000.000,00	24 Unit	1.074.000.000,00
Pengadaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Perawatan Realisasi Pelayanan Pemangku Sesuai Jadwal	100	100	4.889.200.000,00	100	1.229.000.000,00	100	1.350.000.000,00	100	1.350.000.000,00	100	1.450.000.000,00	100	1.550.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	550.000.000,00	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	700.000.000,00	12 Laporan	800.000.000,00	12 Laporan	900.000.000,00	12 Laporan	1.000.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	3.980.200.000,00	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Perawatan Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	100	100	4.130.000.000,00	100	3.948.500.000,00	100	6.458.509.000,00	100	6.572.089.000,00	100	6.899.481.000,00	100	6.541.022.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Penyediaan Jasa Perumahan, Biaya Perumahan dan Pajak Kerdaman Pemukiman Dinas atau Kerdaman Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihayati Dinas Pekerjaan	Jumlah Kerdaman Pemukiman Dinas atau Kerdaman Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihayati Dinas Pekerjaan	5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00
Penyediaan Jasa Perumahan, Biaya Perumahan, Pajak dan Perumahan Kerdaman Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kerdaman Pemukiman Dinas Operasional atau Lapangan	70 Unit	62 Unit	1.280.000.000,00	62 Unit	1.280.000.000,00	62 Unit	1.280.000.000,00	62 Unit	1.280.000.000,00	62 Unit	1.280.000.000,00	62 Unit	1.280.000.000,00
Perumahan/Pemukiman dan Minat Lain-lain	Jumlah Pemukiman dan Minat Lain-lain yang Dipelihara dan Dihayati Dinas Pekerjaan	282 Unit	296 Unit	500.000.000,00	296 Unit	500.000.000,00	296 Unit	500.000.000,00	296 Unit	500.000.000,00	296 Unit	500.000.000,00	296 Unit	500.000.000,00
Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain	Perumahan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain	1 Unit	1 Unit	2.150.000.000,00	2 Unit	3.968.800.000,00	2 Unit	4.478.509.000,00	2 Unit	4.692.085.000,00	2 Unit	4.879.481.000,00	2 Unit	4.561.532.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perumahan yang layak huni	100	100	34.094.529.709,00	100	55.128.000.000,00	100	40.235.000.000,00	100	44.543.000.000,00	100	44.945.000.000,00	100	87.345.000.000,00
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	993.263.000,00	100	320.000.000,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertanggung	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertanggung	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
Pendataan dan Verifikasi Calon Pemukiman Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Pemukiman Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	150.263.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
Identifikasi Pemukiman di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00
Sosialisasi dan Peningkatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Sosialisasi dan Peningkatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	58.144.500.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	900.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.150.000.000,00
Sosialisasi Standar Teknik Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Selakuannya Tanggap Bencana	Jumlah Orang yang Sosialisasi Standar Teknik Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	60 Orang	160 Orang	100.000.000,00	160 Orang	100.000.000,00	160 Orang	300.000.000,00	160 Orang	200.000.000,00	160 Orang	250.000.000,00	160 Orang	300.000.000,00
Pembentukan dan Pelatihan Tim Selaga, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terealisasi	Jumlah Orang pada Tim Selaga, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terealisasi	300 Orang	50 Orang	231.445.000,00	50 Orang	320.000.000,00	50 Orang	300.000.000,00	50 Orang	430.000.000,00	50 Orang	300.000.000,00	50 Orang	550.000.000,00
Koordinasi untuk Monev/evaluasi Penerimaan dan Jasa Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerimaan dan Jasa Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	22.344.521.709,00	100	54.043.000.000,00	100	39.040.000.000,00	100	43.048.000.000,00	100	43.300.000.000,00	100	85.6

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Pemertanewahan Sorch Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksanaan Pemertanewahan Sorch Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	1 Dokumen	800.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	800.000.000,00	1 Dokumen	900.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pemertanewahan Wargo Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Mempersilahkan Pemertanewahan Rumah yang Layak Huni	0	100	900.000.000,00	100	4.270.000.000,00	100	3.440.000.000,00	100	3.440.000.000,00	100	3.440.000.000,00	100	3.440.000.000,00
	Pemertanewahan Pemertanewahan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	100	900.000.000,00	100	440.000.000,00	100	440.000.000,00	100	440.000.000,00	100	440.000.000,00	100	440.000.000,00
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Pemertanewahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Pemertanewahan	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00
Pemertanewahan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Sotras dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Sotras, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
Pemertanewahan dan Verifikasi Calon Pemertanewahan Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Pemertanewahan Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	0	0	0	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
Identifikasi Pemertanewahan di Lokasi yang Bersipat Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Bersipat Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	-	100	3.830.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	0	0	0	50 Unit Rumah	3.830.000.000,00	50 Unit Rumah	3.000.000.000,00	50 Unit Rumah	3.000.000.000,00	50 Unit Rumah	3.000.000.000,00	50 Unit Rumah	3.000.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, EVALUASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pemertanewahan dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Pemertanewahan dan Pemertanewahan Rumah serta Pemertanewahan Perumahan, Sarana dan Utilitas Umum	100	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Pemertanewahan dan Pemertanewahan Rumah serta Pemertanewahan Perumahan, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemungkinan Menengah	Persentase Sertifikasi Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Pemertanewahan dan Pemertanewahan Rumah serta Pemertanewahan Perumahan, Sarana dan Utilitas Umum	100	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemertanewahan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Pemertanewahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemertanewahan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Pemertanewahan dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pemertanewahan rumah dengan Luas 10 - 15 Ha yang	0,65	16,97	80.619.542.000,00	34,61	118.318.432.796,00	45,68	192.246.290.889,00	54,84	160.577.279.455,00	69,17	155.797.873.774,00	100	126.511.386.701,00
Pemertanewahan Kawasan Permukiman Rumah dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase pemertanewahan rumah dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	100	100	1.119.542.000,00	100	1.076.519.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00
Pemertanewahan/Rehabilitasi/Lapangan Kegiatan Bidang PKT	Jumlah Dokumen Kegiatan Bidang PKT yang Terbangun/Terbangun/ Terbangun	1 Dokumen	2 Dokumen	211.179.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00
Pemertanewahan Sorch Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Khusus dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Dokumen Sorch Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Khusus dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	0	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00

BUDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PASU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Pertemuan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk	0	6 Kelompok Masyarakat	397.515.000,00	6 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	6 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	6 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	6 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	6 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	387.153.000,00	3 Laporan	225.515.000,00	3 Laporan	350.000.000,00	3 Laporan	350.000.000,00	3 Laporan	350.000.000,00	3 Laporan	350.000.000,00
Penyediaan Publik Pencogohan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyediaan Publik Pencogohan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0	150 Orang	203.296.000,00	150 Orang	200.000.000,00	150 Orang	200.000.000,00	150 Orang	200.000.000,00	150 Orang	200.000.000,00	150 Orang	200.000.000,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	100	100	49.500.000.000,00	100	117.241.913.795,00	100	191.046.230.889,00	100	159.277.279.455,00	100	154.597.875.774,00	100	125.311.386.701,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perumahan/Perumahan/Perumahan Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencogohan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan/Perumahan/Perumahan Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencogohan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	0	0	0	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	26 Unit Rumah	148 Unit Rumah	30.124.889.800,00	521 Unit Rumah	44.710.000.000,00	1158 Unit Rumah	115.800.000.000,00	904 Unit Rumah	90.400.000.000,00	795 Unit Rumah	79.500.000.000,00	226 Unit Rumah	23.600.000.000,00
Rehabilitasi Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rehabilitasi Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	2,30 Ha	50,68 Ha	33.375.110.200,00	76,57 Ha	72.301.913.795,00	26,15 Ha	60.046.230.889,00	32,75 Ha	50.677.279.455,00	28,36 Ha	44.797.875.774,00	70,21 Ha	61.411.386.701,00
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	0	0	0	0	0	150 Unit Rumah	15.000.000.000,00	150 Unit Rumah	15.000.000.000,00	200 Unit Rumah	20.000.000.000,00	400 Unit Rumah	40.000.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	99,32	100	398.538.300.000,00	100	155.727.658.855,00	100	61.689.836.111,00	100	99.851.710.545,00	100	86.731.160.226,00	100	115.761.894.299,00
Urutan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	100	100	398.538.300.000,00	100	155.727.658.855,00	100	61.689.836.111,00	100	99.851.710.545,00	100	86.731.160.226,00	100	115.761.894.299,00
Pencetakan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Pencetakan Penyediaan PSU Permukiman	6 Dokumen	3 Dokumen	2.102.740.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1872 Lokasi	1350 Lokasi	395.737.880.000,00	568 Lokasi	154.927.628.855,00	210 Lokasi	60.489.836.111,00	361 Lokasi	96.632.914.545,00	303 Lokasi	85.781.160.226,00	380 Lokasi	114.611.894.299,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	282 Laporan	1 Laporan	277.680.000,00	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00
Verifikasi dan Pengawasan PSU Permukiman dan Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Pengawasan PSU Permukiman yang Terverifikasi dan Pengembang	1 Laporan	0	0	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	190.796.000,00	1 Laporan	130.000.000,00	1 Laporan	130.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN RAJAS YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				300.000.000,00		545.888.000,00		567.155.000,00		899.763.000,00		667.698.000,00		681.923.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Tahapan Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Disediakan Target Waktu	100	100	100.000.000,00	100	109.778.000,00	100	112.431.000,00	100	119.953.000,00	100	123.540.000,00	100	136.385.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Perwujudan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	100	100.000.000,00	100	109.778.000,00	100	112.431.000,00	100	119.953.000,00	100	123.540.000,00	100	126.385.000,00
Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	109.778.000,00	1 Dokumen	112.431.000,00	1 Dokumen	119.953.000,00	1 Dokumen	123.540.000,00	1 Dokumen	126.385.000,00
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELESIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ASSENTIF	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Asentif	100	100	200.000.000,00	100	429.110.000,00	100	453.724.000,00	100	479.810.000,00	100	534.158.000,00	100	545.538.000,00
Penetapan Subyek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perwujudan Penetapan Subyek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	100	200.000.000,00	100	429.110.000,00	100	453.724.000,00	100	479.810.000,00	100	534.158.000,00	100	545.538.000,00
Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penetapan Akta dalam rangka Reforma Agraria	1 Berita Acara	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Berita Acara	209.110.000,00	1 Berita Acara	253.724.000,00	1 Berita Acara	279.810.000,00	1 Berita Acara	324.158.000,00	1 Berita Acara	345.538.000,00
Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	N/A	N/A	100.000.000,00	1 Berita Acara	200.000.000,00	1 Berita Acara	200.000.000,00	1 Berita Acara	200.000.000,00	1 Berita Acara	200.000.000,00	1 Berita Acara	200.000.000,00

Paraf

Kepala PD	Kepala Bidang Kepegawaian, Monev dan Pengembangan Monev	Ketua Tim Sub Koordinator Supervisi / Pengembangan Monev
		

LAMPIRAN VII : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL DESK PENYELARASAN DAN VERIFIKASI RANKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN DENGAN RANPERDA RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN

NOMOR :
TANGGAL :

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	64,94	67,08	68,98	70,89	72,79	74,69	75,31	75,31
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	65,42	65,72	66,02	66,32	66,62	66,92	67,22	67,22
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	Persen	0,65	2,33	5,32	6,73	8,01	9,5	12,24	12,24
5	Persentase Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Paraf

Kepala PD	Kepala Bidang Bappeda Mitra PD	Ketua Tim Sub Koordinator Bappeda / Pendamping Mitra PD
		

B. INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai	51,19	74	80	83	85	87	90	90
2	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	Persen	0,65	19,04	43,46	54,99	65,43	77,61	100	100
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Paraf

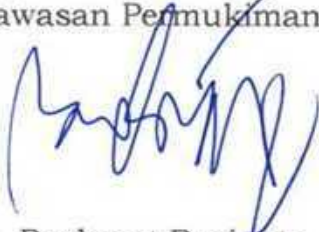
Kepala PD	Kepala Bidang Bappeda Mitra PD	Ketua Tim Sub Koordinator Bappeda / Pendamping Mitra PD
		

FORMULIR E.27
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025-2029

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun renstra perangkat daerah provinsi dan agenda kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah provinsi	√			
4.	Review renstra K/L dan renstra perangkat daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	√			
5.	Penelaahan rencana tata ruang wilayah provinsi	√			
6.	Analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan perangkat daerah provinsi	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah perangkat daerah provinsi	√			
9.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah perangkat daerah provinsi	√			
10.	Mempelajari surat edaran gubernur perihal penyusunan rancangan renstra perangkat daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-perangkat daerah provinsi	√			
11.	Perumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi	√			
12.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama Tahun 2025-2030, termasuk lokasi kegiatan	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Perumusan indikator kinerja perangkat daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	√			
14.	Pelaksanaan forum perangkat daerah provinsi	√			
15.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
16.	Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah provinsi	√			
17.	Pentahapan pelaksanaan program perangkat daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi	√			
18.	Dokumen renstra perangkat daerah provinsi yang telah disahkan	√			

Serang, 05 Agustus 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten



M. Rachmat Rogianto, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710720 200212 1 004

Petunjuk Pengisian Formulir E.27:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

[illegible]

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN / SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tujuan PD. 1 :	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Indikator Tujuan PD.1 : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Positif	Persen	$PHLTB = \left(\frac{JRTHLTB}{JRT}\right) \times 100\%$ - PHLTB : Persentase rumah tanggan dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan - JRTHLTB : Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan - JRT : Jumlah rumah tangga	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak	Memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak	Tahunan	Proyeksi Bappenas	67.08	68.98	70.89	72.79	74.69	75.31
Sasaran PD. 1 :	Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Indikator Sasaran PD.1 : Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Positif	Persen	$\text{Persentase Rumah yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan} = \left(\frac{\sum \text{rumah yang layak, terjangkau dan berkelanjutan}}{\sum \text{rumah di Provinsi Banten}}\right) \times 100\%$	- Baseline data berdasarkan RKPD Kab/Kota, RPJMD Kab/Kota, Open Data Kab. Tangerang, Data Tangsel, Sikondang Kota Serang, dan BPS. Total jumlah rumah di Provinsi Banten di perkirakan sebanyak 2.943.491 unit rumah. "Persentase yang menggambarkan peningkatan capaian rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Capaian rumah layak huni yang dihitung dalam persentase tersebut adalah rumah layak huni yang dibangun dan di rehabilitasi/di perbaiki/di tingkatkan kualitasnya dengan anggaran APBN, APBD Tk. I, APBD Tk. II, dan Pengembangan.	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa kebutuhan rumah layak hampir terpenuhi sepenuhnya	Tahunan	RKPD Kab/Kota, RPJMD Kab/Kota, Open Data Kab. Tangerang , Data Tangsel, Sikondang Kota Serang, dan BPS	65.72	66.02	66.32	66.62	66.92	67.22
	Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Indikator Sasaran PD. 2 : Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	Positif	Persen	$\text{Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani} = \left(\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Tahun-N}}{\text{Total Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi}}\right) \times 100\%$	(Mengacu Permen PUPR 14/2018) • Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. • Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan pola penanganan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. (Mengacu Permen PUPR 7/2022) • Peningkatan kualitas RTLH adalah penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan permukiman dan/atau mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh. (Mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014)	• Total Kawasan Kumuh di Provinsi Banten Kewenangan Provinsi sebesar 2.562,42 Ha • Disepakati hasil dari Desk Verifikasi Rumus Hitung dan Definisi Operasional Renstra Tahun 2025 - 2029 bersama Bappeda bahwa pembagi dari rumus perhitungan persentase luas kawasan kumuh yg ditangani menggunakan data total luas kawasan kumuh kewenangan Provinsi se - Provinsi Banten. Walaupun pada akhir periode belum mencapai 100%, akan tetapi dapat terlihat perjalanan capaiannya dan dapat terlihat dan dihitung juga luasan yg belum ditangani untuk perencanaan periode 5 tahun selanjutnya.	Tahunan	SK Kawasan Kumuh	2.33	5.32	6.73	8.01	9.50	12.24
	Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Indikator Sasaran PD. 3 : Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Positif	Persen	$\text{Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman} = \left(\frac{\sum \text{unit penyediaan PSU Permukiman di Tahun-N}}{\sum \text{Total rencana unit penyediaan PSU Permukiman pada Tahun-N}}\right) \times 100\%$	Penyediaan unit PSU Permukiman diukur dengan capaian jumlah unit penyediaan PSU Permukiman se Provinsi Banten pada Tahun n	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan PSU Permukiman terlaksana sesuai target yang direncanakan	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Indeks RB dihitung dengan menjumlahkan dua komponen utama: Nilai RB General: Mengukur capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum. Nilai RB Tematik: Mengukur capaian dalam area tematik tertentu yang relevan dengan reformasi birokrasi Indeks RB = (Nilai RB General + Nilai RB Tematik) Setiap nilai komponen (RB General dan RB Tematik) diperoleh melalui evaluasi terhadap berbagai indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan	Indeks yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan proses bisnis, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas layanan publik. Note: Untuk Kinerja, Indikator, Rumus Perhitungan, DO Program sampai dengan Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di seragamkan oleh Bappeda. Dan baseline data target program berdasarkan hasil IRB yg di share oleh Bappeda.	Komponen Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi terdapat dua dimensi yaitu dimensi RB General terdiri dari: 1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 3. Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi dan Dimensi RB Tematik terdiri dari: 1. Komponen Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut: 1. AA (Nilai >100) - Sangat Memuaskan 2. A (Nilai >80-100) - Memuaskan 3. A- (Nilai >60-100) - Memuaskan dengan catatan 4. BB (Nilai >70-80) - Sangat Baik 5. B (Nilai > 60- 70) - Baik 6. CC (Nilai > 50-60) - Cukup 7. C (Nilai > 30-50) - Kurang 8. D (Nilai 0-30) - Sangat Kurang	Tahunan	Biro Organisasi dan Bappeda	74	80	83	85	87	90

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATO R	UKURAN / SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULA N DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah (seperti dinas, badan, atau instansi pemerintah daerah lainnya). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah bagian dari SAKIP, yaitu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan. Nilai AKIP diberikan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dari perangkat daerah. Evaluasi biasanya dilakukan oleh Inspektorat Komponen Penilaian AKIP: Perencanaan Kinerja (perencanaan strategis dan kinerja tahunan) Pengukuran Kinerja (indikator kinerja dan pengumpulan data) Pelaporan Kinerja (dokumen LAKIP/UKJIP) Evaluasi Internal (monitoring dan tindak lanjut perbaikan) Capaian Kinerja (hasil/output yang dicapai)	Nilai AKIP Perangkat Daerah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja perangkat daerah	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan gambaran tingkat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dengan kategori predikat sebagai berikut: 1. Predikat AA (Nilai > 90) - Sangat Memuaskan 2. Predikat A (Nilai >80-90) - Memuaskan 3. Predikat BB (Nilai > 70-80) - Sangat Baik 4. Predikat B (Nilai > 60-70) - Baik 5. Predikat CC (Nilai > 50-60) - Cukup (Memadai) 6. Predikat C (Nilai > 30-50) - Kurang 7. Predikat D (Nilai > 0-30) - Sangat Kurang	Tahunan	Inspektora	79.3	80.1	83	85	87	90
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Positif	Dokumen				Tahunan		3	2	2	2	2	3
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Positif	Laporan				Tahunan		16	17	17	17	17	17
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Positif	Laporan				Tahunan		12	14	14	14	14	14
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Positif	Data				Tahunan		5	1	1	1	1	1

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATO R	UKURAN / SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULA N DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Positif	Berita Acara				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Positif	Dokumen				Tahunan		7	6	6	6	6	6
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)	Positif	Persen	$\text{Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP} = \left(\frac{\sum \text{Laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (standar akuntansi pemerintahan)}}{\sum \text{Total Laporan Keuangan}} \right) \times 100\%$	Proporsi atau bagian dari seluruh dokumen pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh perangkat daerah (seperti pemerintah daerah atau instansi terkait) yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip dan pedoman yang diatur dalam SAP SAP adalah sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perangkat daerah mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. SAP mengatur cara penyusunan laporan keuangan, termasuk penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK)	Persentase ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyusunan laporan keuangan perangkat daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu : Perangkat daerah telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan dengan baik. Kualitas laporan keuangan tinggi, transparan, dan akuntabel. Memudahkan proses audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pimpinan daerah	Triwulanan, semesteran dan Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Positif	Orang / Bulan				Tahunan		55	140	140	140	140	140
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Positif	Dokumen				Tahunan		8	12	12	12	12	12
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Positif	Dokumen				Tahunan		8	12	12	12	12	12
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Positif	Dokumen				Tahunan		12	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Positif	Laporan				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaa	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaa dan Tindak Lanjut Pemeriksaa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaa dan Tindak Lanjut Pemeriksaa	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Positif	Laporan				Tahunan		18	18	18	18	18	18

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATO R	UKURAN / SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULA N DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik	Positif	Persen	$\text{Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik} = \left(\frac{\sum \text{Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik}}{\sum \text{Total Barang Milik Daerah yang diperiksa}} \right) \times 100\%$	Ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana barang milik daerah (BMD) telah tercatat dengan baik dalam sistem administrasi dan kondisi fisiknya sesuai dengan data yang tercatat.	Semakin tinggi nilai persentase mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan barang milik daerah untuk memastikan keandalan data dan keberlanjutan pemanfaatan aset daerah	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Positif	Laporan				Tahunan		3	3	3	3	3	3
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Positif	Laporan				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	Positif	Persen	$\text{Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK} = \left(\frac{\sum \text{ASN Perangkat Daerah dengan predikat SKP} \geq \text{"Baik"}}{\sum \text{Total ASN Perangkat Daerah}} \right) \times 100\%$	Proporsi atau persentase dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di suatu perangkat daerah (seperti kementerian, lembaga, atau dinas daerah) yang memiliki penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat minimal "BAIK"	Ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja ASN berdasarkan tugas yang telah ditetapkan selama satu periode (biasanya tahunan). menggambarkan seberapa banyak pegawai di perangkat daerah tersebut yang berhasil memenuhi atau melebihi standar kinerja yang diharapkan	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Positif	Paket				Tahunan		1	2	2	2	2	2
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Positif	Dokumen				Tahunan		1	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Positif	Dokumen				Tahunan		2	2	2	2	2	2
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Positif	Dokumen				Tahunan		1	0	0	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Positif	Orang				Tahunan		10	10	10	10	10	10
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	Positif	Persen	$\text{Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal} = \left(\frac{\sum \text{Kegiatan yang sesuai standar dan jadwal}}{\sum \text{Total kegiatan yang direncanakan}} \right) \times 100\%$	ukuran kuantitatif yang menggambarkan proporsi kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam suatu periode waktu tertentu	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik, efektif dan efisien pula kinerja administrasi yang dilakukan.	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Positif	Paket				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Positif	Paket				Tahunan		8	8	8	8	8	8
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Positif	Paket				Tahunan		1	1	1	1	1	1

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATO R	UKURAN / SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULA N DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Positif	Paket				Tahunan		2	2	2	2	2	2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Positif	Laporan				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Positif	Dokumen				Tahunan		2	1	1	1	1	1
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Positif	Dokumen				Tahunan		6	6	6	6	6	6
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	Positif	Persen	$\text{Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar} = \left(\frac{\sum \text{Sarana/Prasarana yang Tersedia}}{\sum \text{Total Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan sesuai standar dan RKBMd}} \right) \times 100\%$	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana kantor yang telah tersedia dengan jumlah kebutuhan ideal yang ditetapkan berdasarkan standar dan RKBMd	Persentase yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa kantor semakin mendekati kondisi ideal dalam hal kelengkapan fasilitas kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi secara optimal	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Positif	Unit				Tahunan		4	6	5	1	1	1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Positif	Unit				Tahunan		2	47	46	56	28	24
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	Positif	Persen	$\text{Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal} = \left(\frac{\sum \text{Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal}}{\sum \text{Total layanan penunjang yang direncanakan}} \right) \times 100\%$	Indikator ini menunjukkan tingkat kedisiplinan dan efisiensi unit penunjang dalam memberikan pelayanan sesuai waktu yang telah dijadwalkan.	Semakin tinggi persentasenya, berarti pelayanan penunjang semakin tepat waktu dan sesuai rencana.	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Positif	Laporan				Tahunan		12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Positif	Laporan				Tahunan		12	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Positif	Laporan				Tahunan		12	12	12	12	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	Positif	Persen	$\text{Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik} = \left(\frac{\sum \text{Barang Milik Daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik}}{\sum \text{Total Barang Milik Daerah}} \right) \times 100\%$	Ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah BMD yang dirawat secara berkala dan tercatat dalam kondisi fisik baik terhadap total keseluruhan BMD yang tercatat dalam daftar inventaris.	Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pemeliharaan aset daerah oleh pemerintah daerah, serta menunjukkan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan fungsi dari barang milik daerah tersebut serta untuk acuan sejauh mana aset atau barang milik pemerintah daerah masih dalam kondisi layak pakai, fungsional, dan tidak rusak	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Positif	Unit				Tahunan		5	5	5	5	5	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Positif	Unit				Tahunan		62	62	62	62	62	62

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATO R	UKURAN / SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULA N DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Positif	Unit				Tahunan		396	396	396	396	396	396
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Positif	Unit				Tahunan		1	2	2	2	2	2
Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	<u>Indikator Program PD. 1</u> Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Positif	Persen	$\left(\frac{\sum \text{Warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun}-N}{\sum \text{Total rencana warga negara korban bencana provinsi yang akan ditangani pada tahun}-N} \right) \times 100\%$	- Ketentuan bencana yang dapat dilayani dengan SPM adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. - Warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. - Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat bencana yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk: a. identifikasi perumahan di lokasi rawan b. identifikasi lahan dan c. data rumah yang terkena sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%. (Sumber: Permenpupr 13 Tahun 2023).	Bencana yang dihitung pada indikator ini meliputi 2 jenis bencana berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu Bencana Alam dan Non Alam. Dan dikarenakan indikator ini merupakan SPM, maka capaian tiap tahun nya 100%.	Tahunan	Laporan DPRKP	100	100	100	100	100	100
		<u>Indikator Program PD. 2</u> Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Positif	Persen	$\left(\frac{\sum \text{Warga negara terkena relokasi program provinsi yang mendapatkan layanan fasilitas penyediaan rumah layak huni pada tahun}-N}{\sum \text{Total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun}-N} \right) \times 100\%$	- Program Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka: a. pengurangan kawasan kumuh 10-15 b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan dan/atau e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana. - Warga negara terkena relokasi akibat program provinsi adalah warga negara terkena relokasi yang mendapatkan layanan penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. - Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat relokasi program Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk: a. perumahan di lokasi rawan bencana b. perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang c. perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan e. perumahan yang berada di daerah rawan f. rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun, dan/atau Rumah Khusus sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%. (Sumber: Permenpupr 13 Tahun 2023).	Kalau pemda melakukan minimal pendataan elemen data diisi 1/1, tetapi kalau tidak ada kegiatan sama sekali terkait dengan pengumpulan data elemen data diisi 0/1.	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Meningkatnya Pendataan Penyediaan Rumah Korban Bencana Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Positif	Persen	$\left(\frac{\sum \text{Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Provinsi di Tahun}-N}{\sum \text{Total Rencana Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Provinsi pada Tahun}-N} \right) \times 100\%$	Pendataan dalam pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi yg terdampak program Provinsi dengan tahapan identifikasi, pengumpulan data, pendataan, dan verifikasi.	Jika persentasenya mendekati 100%, maka pendataan terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Provinsi terpenuhi	Tahunan	Laporan DPRKP	100	100	100	100	100	100
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Positif	Dokumen				Tahunan		2	2	2	2	2	2
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Positif	Dokumen				Tahunan		1	2	2	2	2	2
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Positif	Dokumen				Tahunan		1	2	2	2	2	2

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATO R	UKURAN / SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULA N DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Positif	Dokumen				Tahunan		1	2	2	2	2	2
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Positif	Dokumen				Tahunan		0	1	1	1	1	1
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksanannya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Positif	Persen	<i>Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</i> $= \frac{\sum(A + B + C)}{\sum \text{Total Sub Kegiatan}}$ dimana: - A : Persentase Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana = (Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Jumlah Orang/Sukarelawan yang ditargetkan)*100% - B : Persentase Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih = Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih/Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang ditargetkan)*100% - C : Persentase Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan yang tersedia = (Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan yang tersedia/Jumlah Dokumen Data Penerima yang ditargetkan)*100%	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi merupakan kegiatan pendukung dari Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang berisikan kegiatan terkait sosialisasi standar teknis penyediaan rumah kepada masyarakat dan juga koordinasi untuk menyepakati ppenerima dan jenis pelayanannya dengan masyarakat dan instansi terkait. Selain itu, dibentuk juga tim satgas, tim pendamping dan fasilitator untuk melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi tersebut.	Jika persentasenya mendekati 100%, maka Sosialisasi dan Persiapan untuk mendukung Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi telah dilaksanakan sesuai target	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Positif	Orang				Tahunan		160	160	160	160	160	160
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Positif	Orang				Tahunan		50	50	50	50	50	50
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Positif	Persen	<i>Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</i> $= \left(\frac{\sum \text{pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana (bencana alam dan non alam) atau relokasi program Provinsi yg ditangani di Tahun-N}}{\sum \text{Total Bencana pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi yg ditangani pada Tahun-N}} \right) \times 100\%$	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi terdiri dari Pembangunan Rumah, Rehabilitasi Rumah, dan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU yang di sediakan bagi Korban Bencana (Bencana alam dan non alam) dan/atau masyarakat yang terkena relokasi program Provinsi	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa kebutuhan rumah layak hampir terpenuhi sepenuhnya	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Positif	Unit Rumah				Tahunan		49	72	86	103	105	110
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Positif	Unit Rumah				Tahunan		110	100	100	100	100	100
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Positif	Unit Rumah				Tahunan		318	200	200	100	100	100

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATO R	UKURAN / SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULA N DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Positif	Unit Rumah				Tahunan		0	50	50	30	30	30
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Positif	Persen	$\text{Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi} = \left(\frac{\sum \text{Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang terlaksana pada tahun}-N}{\sum \text{Total target Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi pada tahun}-N} \right) \times 100\%$	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi terdiri dari pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan perumahan dan serah terima rumah bagi korban bencana Provinsi pada masyarakat.	Semakin tinggi persentasenya, berarti Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi terlaksana sesuai rencana.	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Positif	Laporan				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	<u>Indikator Program PD.3</u> Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	Positif	Persen	$\text{Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani} = \left(\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang telah ditangani (Ha)}}{\text{Target luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang teridentifikasi (Ha)}} \right) \times 100\%$	• Program Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka: a. pengurangan kawasan kumuh kurang dari 10 b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan dan/atau e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana. • Warga negara terkena relokasi akibat program kabupaten/kota adalah warga negara terkena relokasi yang mendapatkan layanan penggantian hak atas pengusasaan tanah dan/atau bangunan, dan bantuan akses rumah sewa layak huni. • Bagi Pemerintah Daerah yang tidak terdapat relokasi program Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu tetap melakukan pengumpulan data dalam bentuk: a. perumahan di lokasi b. perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang c. perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi d. perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan e. perumahan yang berada di daerah rawan f. rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun, dan/atau Rumah Khusus sehingga diperoleh capaian pendataan senilai 100%. (Sumber: Permenpu 13 Tahun 2023)	• Total Kawasan Kumuh di Provinsi Banten dengan Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani dari tahun 2025 - 2030 sebesar 313,52 Ha • Untuk penanganan selama 5 tahun hanya fokus kepada kumuh dengan luasan 10 - 15 Ha. Pembilang nya adalah luas kawasan kumuh yang ditangani pada tahun berjalan, sedangkan penyebutnya adalah total seluruh luas kawasan kumuh yang ditangani selama 5 tahun	Tahunan	SK Kawasan Kumuh	19.04	43.46	54.99	65.43	77.61	100.00
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Meningkatnya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Positif	Persen	$\text{Persentase Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha} = \frac{\sum(A + B + C + D + E)}{\sum \text{Total Sub Kegiatan}}$ dimana: - A : Persentase Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi = (Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi/Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang ditargetkan)*100% - B : Persentase Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha = Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha/Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang ditargetkan)*100% dimana, terdapat output jumlah rumah yang diserah terimakan kepada masyarakat. - C : Persentase Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina = (Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina/Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang ditargetkan)*100% - D : Persentase Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman = (Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman/Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang ditargetkan)*100% - E : Persentase Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh = (Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh/Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh yang ditargetkan)*100%	Aktivitas Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha meliputi penyusunan/review/legalisasi kebijakan bidang pkp yg antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Semakin tinggi persentasenya, berarti Penataan Kawasan Permukiman Kumuh terlaksana sesuai rencana.	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Positif	Dokumen				Tahunan		2	1	1	1	1	1
Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1

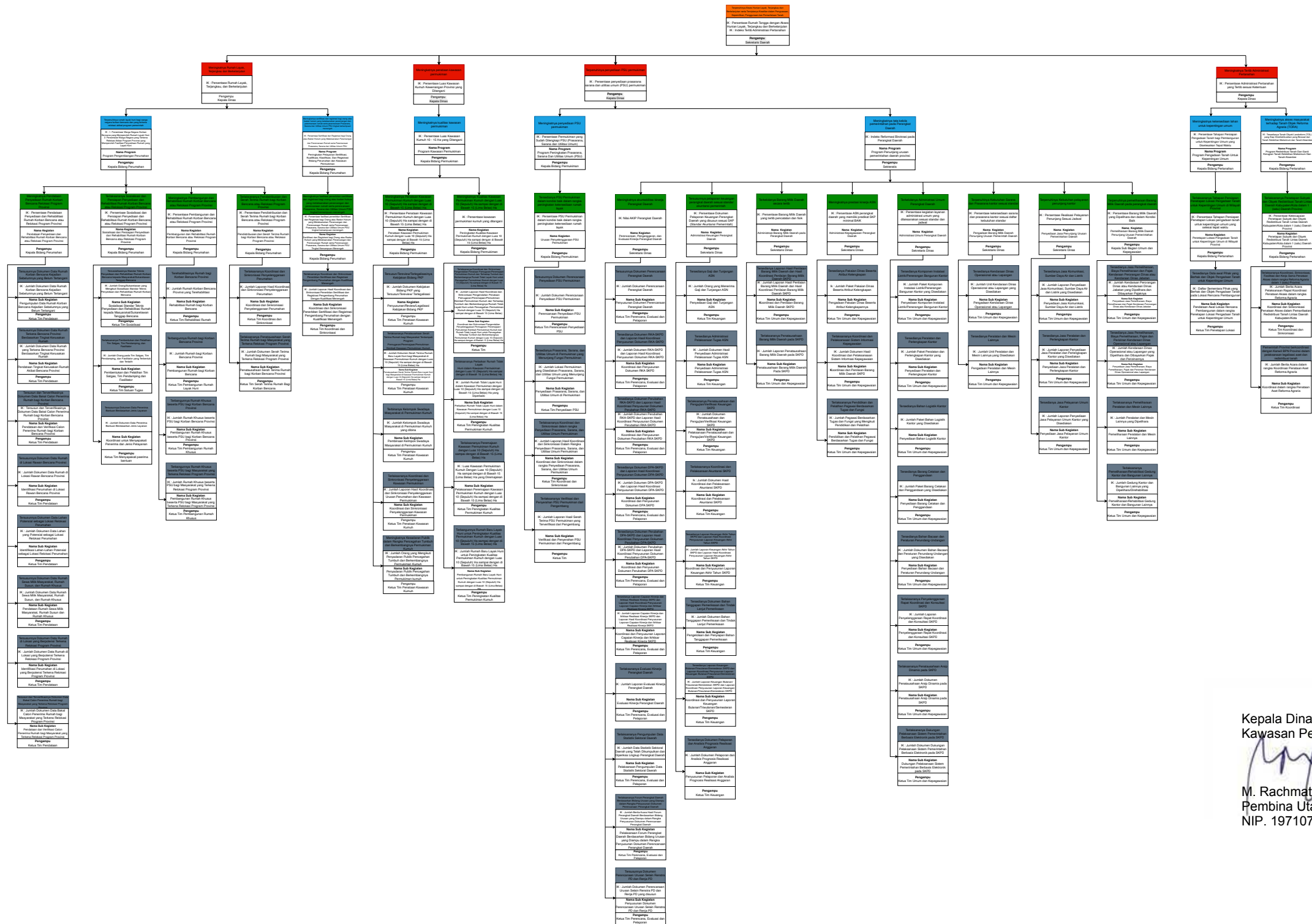
KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATO R	UKURAN / SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULA N DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	Positif	Kelompok Masyaraka t				Tahunan		6	6	6	6	6	6
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Positif	Laporan				Tahunan		1	3	3	3	3	3
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Positif	Orang				Tahunan		150	150	150	150	150	150
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Positif	Persen	$\left(\frac{\text{Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani} = \text{Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Tahun--N yang ditangani}}{\text{Total Rencana Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang akan ditangani pada Tahun--N yang akan ditangani}} \right) \times 100\%$	(Mengacu Permen PUPR 14/2018) • Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. • Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan pola penanganan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. (Mengacu Permen PUPR 7/2022) • Peningkatan kualitas RTLH adalah penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan permukiman dan/atau mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh. (Mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014) • Pemerintah Daerah provinsi memiliki kewenangan penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada luas 10 - 15 hektar. • Rencana jumlah kawasan pada penanganan 2025 - 2030 : 2025 = 5 kawasan, 2026 = 6 kawasan, 2027 = 3 kawasan, 2028 = 3 kawasan, 2029 = 3 kawasan, 2030 = 6 kawasan.	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh terlaksana sesuai target yang direncanakan.	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Positif	Laporan				Tahunan		0	1	1	1	1	1
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Positif	Unit Rumah				Tahunan		148	521	1158	904	795	236
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Positif	Ha				Tahunan		59.68	76.57	36.15	32.75	38.16	70.21

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATO R	UKURAN / SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULA N DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Positif	Unit Rumah				2 Tahunan		0	0	150	150	300	400
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	<u>Indikator Program PD. 4</u> : Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Positif	Persen	$\text{Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU} = \left(\frac{\sum \text{fasilitasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah di Tahun}-N}{\sum \text{total rencana fasilitasi penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah pada Tahun}-N} \right) \times 100\%$	Ukuran proporsional yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan profesionalisme pelaku usaha serta tenaga ahli dalam sektor perumahan dan permukiman yang telah memperoleh sertifikasi dan terdaftar secara resmi sesuai peraturan yang berlaku.	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh terlaksana sesuai target yang direncanakan	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Tercapainya fasilitasi Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase fasilitasi Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Positif	Persen	$\text{Persentase fasilitasi Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU} = \left(\frac{\sum \text{Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah di Tahun}-N}{\sum \text{Total rencana fasilitasi penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah pada Tahun}-N} \right) \times 100\%$	Aktivitas meliputi pembinaan kepada pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah, pendataan asosiasi dan pengembang perumahan, pemantauan pembangunan perumahan (kualitas bangunan) yang dibangun pengembang dan aktivitas lain yang mendukung koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah.	semakin tinggi nilai persentase mencerminkan efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Positif	Laporan				Tahunan		4	1	1	1	1	1
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	<u>Indikator Program PD. 5</u> : Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Positif	Persen	$PPSU = \left(\frac{P_{PSU}}{P_{total}} \right) \times 100\%$ Keterangan : - PPSU : Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (%) - P _{PSU} : Jumlah permukiman yang telah memiliki PSU sesuai standar - P _{total} : Jumlah total permukiman dalam wilayah	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU adalah ukuran proporsional yang menunjukkan seberapa besar cakupan kawasan permukiman yang telah memiliki Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu.	Permukiman diasumsikan sama dengan Lokasi, dikarenakan dalam 1 lokasi sudah mencakup 1 permukiman. • Disepakati hasil dari Desk Verifikasi Rumus Hitung dan Definisi Operasional Renstra Tahun 2025 - 2029 bersama Bappeda bahwa dalam perhitungan persentase permukiman yg sudah dilengkapi PSU pembilang nya adalah jumlah lokasi yg terealisasi di tahun n dan penyebut nya adalah rencana jumlah lokasi yg akan dilaksanakan di tahun n, dikarenakan pada pelaksanaannya Program Urusan penyelenggaraan PSU Permukiman tidak hanya menangani berdasarkan baseline data program dinas, tapi juga berdasarkan pokok - pokok pikiran dan mandatory pimpinan.	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Tersedianya PSU Permukiman dalam kondisi baik dalam rangka peningkatan ketersediaan rumah layak	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Positif	Persen	$\text{Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman} = \left(\frac{\sum \text{Penyediaan PSU yang ditangani di Tahun}-N}{\sum \text{Total rencana penyediaan PSU yang akan di tangani pada Tahun}-N} \right) \times 100\%$	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU adalah ukuran proporsional yang menunjukkan seberapa besar cakupan kawasan permukiman yang telah memiliki Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu.	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan PSU Permukiman terlaksana sesuai target yang direncanakan	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Positif	Dokumen				Tahunan		3	1	1	1	1	1

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATO R	UKURAN / SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULA N DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Positif	Laporan				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Positif	Lokasi				Tahunan		1350	803	803	803	803	804
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Positif	Laporan				Tahunan		0	1	1	1	1	1
		Indikator Tujuan PD.2 : Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Positif	Persen	<i>Indeks Tertib Administrasi Pertanahan</i> = (Persentase Sertifikat Aset Pemda × 75%) + (Persentase realisasi administrasi pemenuhan kebutuhan tanah x 25%)	Untuk mengukur tingkat keteraturan, kelengkapan, dan keakuratan data serta dokumen pertanahan di suatu wilayah administratif (desa, kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota). Indeks ini mencerminkan sejauh mana wilayah tersebut telah menjalankan tata kelola pertanahan yang sesuai dengan kaidah administrasi pertanahan yang baik: legal, akuntabel, transparan, dan mudah diakses.	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan administrasi pertanahan telah sesuai dengan kaidahnya	Tahunan	BPN	100	100	100	100	100	100
Sasaran PD. 2 :	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indikator Sasaran PD. 2 : Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	Positif	Persen	<i>Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan =</i> $\left(\frac{\sum \text{fasilitasi administrasi persiapan pengadaan tanah dan administrasi penyediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang tertib dan selesai tepat waktu pada tahun-N}}{\sum \text{Total fasilitasi administrasi persiapan pengadaan tanah dan administrasi penyediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang ditangani sesuai ketentuan pada Tahun-N}} \right) \times 100\%$	Indikator ini menjelaskan terkait capaian dari administrasi pertanahan agar tertib sesuai ketentuan	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan administrasi pertanahan telah sesuai dengan ketentuan	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Indikator Program PD. 1 : Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Positif	Persen	<i>Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu =</i> $\left(\frac{\sum \text{Tahapan yang diselesaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total tahapan yang ditetapkan}} \right) \times 100\%$	Tahapan dalam proses ini meliputi penetapan lokasi dan peruntukan tanah, penyusunan rencana pengadaan tanah, pemberitahuan kepada pemilik tanah, penyediaan ganti kerugian, penawaran dan kesepakatan harga, pembayaran ganti rugi, dan pemindahan hak atas tanah kepada pemerintah. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat banyak, seperti pembangunan infrastruktur publik, fasilitas umum, atau proyek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dan setiap tahapan persiapan pengadaan tanah yang dimaksud berhasil diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana atau target waktu yang telah ditentukan.	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah Diselesaikan Tepat Waktu	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Tahapan Persiapan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Persiapan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Positif	%	<i>Persentase Persiapan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu =</i> $\left(\frac{\sum \text{Tahapan Persiapan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Tahun-N}}{\sum \text{Total Rencana Tahapan Persiapan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Tahun-N}} \right) \times 100\%$	Tahapan dalam proses ini meliputi penetapan lokasi dan peruntukan tanah, penyusunan rencana pengadaan tanah, pemberitahuan kepada pemilik tanah, penyediaan ganti kerugian, penawaran dan kesepakatan harga, pembayaran ganti rugi, dan pemindahan hak atas tanah kepada pemerintah.	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah Diselesaikan Tepat Waktu	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Positif	Dokumen				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Indikator Program PD. 2 : Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Positif	Persen	<i>Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee =</i> $\left(\frac{\sum \text{penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha}}{\sum \text{penerima tanah obyek landreform}} \right) \times 100\%$	Kondisi tanah yang termasuk dalam Tanah Obyek Landreform (TOL), yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, telah melalui tahapan identifikasi, verifikasi dan legalisasi sehingga siap untuk didistribusikan kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, untuk mengukur efektivitas kebijakan landreform dalam menyediakan tanah bagi masyarakat.	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee telah Diselesaikan Tepat Waktu	Tahunan	BPN	100	100	100	100	100	100

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATO R	UKURAN / SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULA N DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Positif	Persen	$\text{Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi} = \frac{\sum \text{Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi}}{(\sum \text{Total rencana penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada tahun}-N)} \times 100\%$	Dalam kegiatan ini meliputi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Penataan Aset Reforma Agraria	Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee telah Diselesaikan Tepat Waktu	Tahunan	Laporan Kinerja DPRKP	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	Positif	Berita Acara				Tahunan		1	1	1	1	1	1
Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi dalam pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Positif	Berita Acara				Tahunan		1	1	1	1	1	1

CASCADING DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN



Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

M. Rachmat Rogianto, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710720 200212 1 004

M. Rachmat Rogianto, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710720 200212 1 004

IK : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelayutan
IK : Indeks Terib Administrasi Pertanahan

